



RENCANA STRATEGIS

Th.2025/2029

Oleh :

**DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KAB. TEMANGGUNG**

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

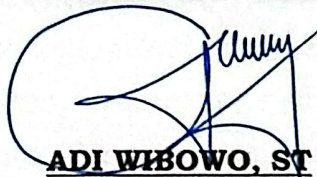
Disusun oleh :

**TIM PENYUSUN RENSTRA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumber Daya
Alam dan Infrastruktur



ADI WIBOWO, ST
NIP. 19811101 200903 1 003

Sub Koordinator



Ir. GUNADI, MM
NIP. 19680721 200701 1 017

Mengetahui

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



Drs. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan selama lima tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2025–2029.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai operasionalisasi RPJMD dilaksanakan melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru..

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Temanggung pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang pada khususnya.

Temanggung, Agustus 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

JOKO BUDI MURYANTO, SP, MSi

NIP. 19710630 199803 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DKPPP	9
2.1.1 Struktur Organisasi DKPPP	9
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi DKPPP	9
2.1.2.1 Kepala	13
2.1.2.2 Sekretaris	13
2.1.2.3 Bidang Sarana dan Prasarana	21
2.1.2.4 Bidang Penyuluhan	27
2.1.2.5 Bidang Pangan dan Tanaman Pangan	32
2.1.2.6 Bidang Hortikultura dan Perkebunan	37
2.1.2.7 Bidang Peternakan	41
2.1.2.8 Bidang Perikanan	50
2.1.2.9 Kelompok Jabatan Fungsional.....	52
2.1.2.10 UPTD Balai Benih Pertanian	52

2.1.2.11 UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar	
Hewan	54
2.1.2.12 UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai	
Inseminasi Buatan	57
2.2 Sumber Daya DKPPP	59
2.2.1 Sumber Daya Manusia	59
2.2.2 Asset/Modal	59
2.3 Kinerja Pelayanan DKPPP	60
2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama	73
2.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	74
2.6 Kelompok Sasaran Layanan	75
2.7 Permasalahan dan Isu Strategis	78
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	88
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Pelayanan DKPPP	88
3.2 Isu-isu Strategis.....	84
3.3 Arah Kebijakan.....	95
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	99
BAB V PENUTUP	228

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Personil dan Tata Laksana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.....	59
Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.....	60
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2020-2025.....	61
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024.....	73
Tabel 2.5	Capaian indikator kinerja kunci sesuai tupoksi Tahun 2020-2024.....	74
Tabel 2.6	Jenis pelayanan di Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.....	76
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	81
Tabel 2.8	Permasalahan dan Isu Strategis.....	83
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.....	86
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.....	89
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.....	96
Tabel 4.1	Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.....	101
Tabel 4.2	Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	147
Tabel 4.3	Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan.....	162

Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	207
Tabel 4.5	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah.....	211
Tabel 4.6	Program Nasional.....	214
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.....	221
Tabel 4.8	Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.....	225

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah...	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung.....	12
Gambar 3.1	Konsep Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung	85
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung	85
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

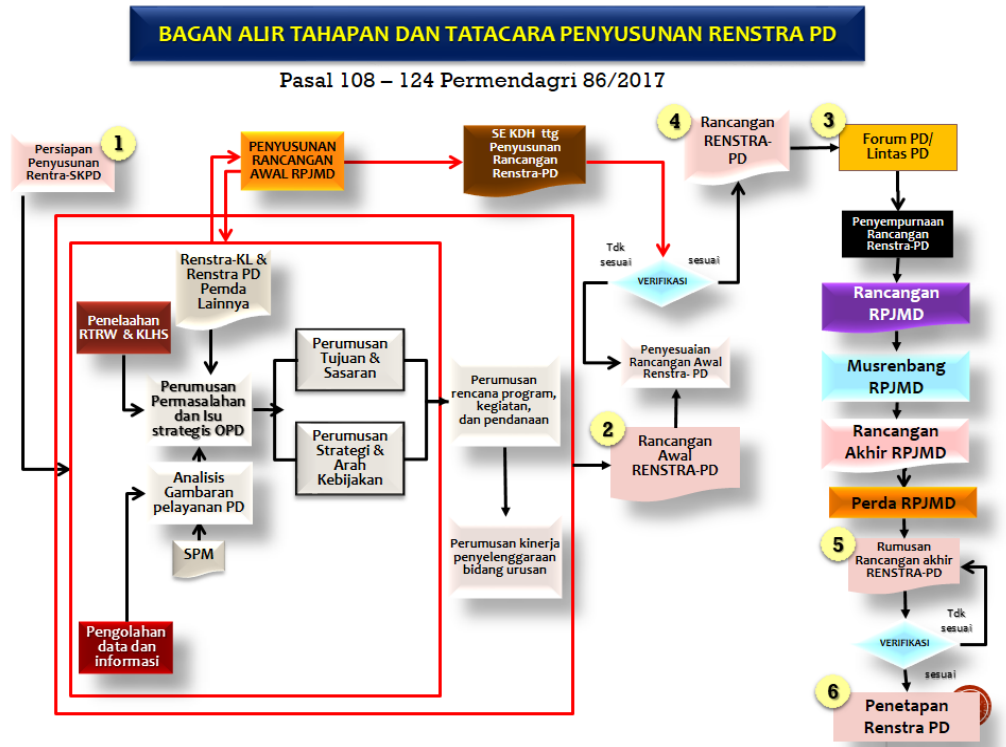
1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Keberadaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan. Pembangunan di bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi dan daya saing serta keanekaragaman pangan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
28. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah
29. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 | 732
- 2014 tentang Pengendalian Penanggulangan Penyakit Hewan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan Pangan, Pertanian dan Perikanan
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.

- f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah :
- a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .
 - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber daya perangkat daerah
 - c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d. Kelompok sasaran layanan (misalnya bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah)
2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Paling sedikit memuat :

1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah

6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

2.1 Gambaran Pelayanan DKPPP

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan Pangan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Adapun rincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai berikut:

- a. Perumusan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;

- c. Perumusan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
- d. Pengembangan teknologi pangan, pertanian dan perikanan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
- f. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur ketahanan pangan, pertanian serta perikanan;
- g. Pengendalian lahan dan mitigasi bencana di lingkup pangan, pertanian dan perikanan;
- h. Pembinaan, pengawasan, penilaian kelayakan dan rekomendasi serta penerbitan izin usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
- i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
- j. Pengelolaan peraturan perundang-undangan di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;

- l. Pembinaan, pengawasan dan penilaian atas pegawai dan pelaksanaan tugas di lingkup dinas;
- m. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
- n. Pengelolaan anggaran yang menjadi tanggung jawab dinas;
- o. Pelaksanaan pembinaan kepada upt di lingkup dinas;
- p. Penyelenggaraan pelaporan kinerja pemerintah daerah;
- q. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

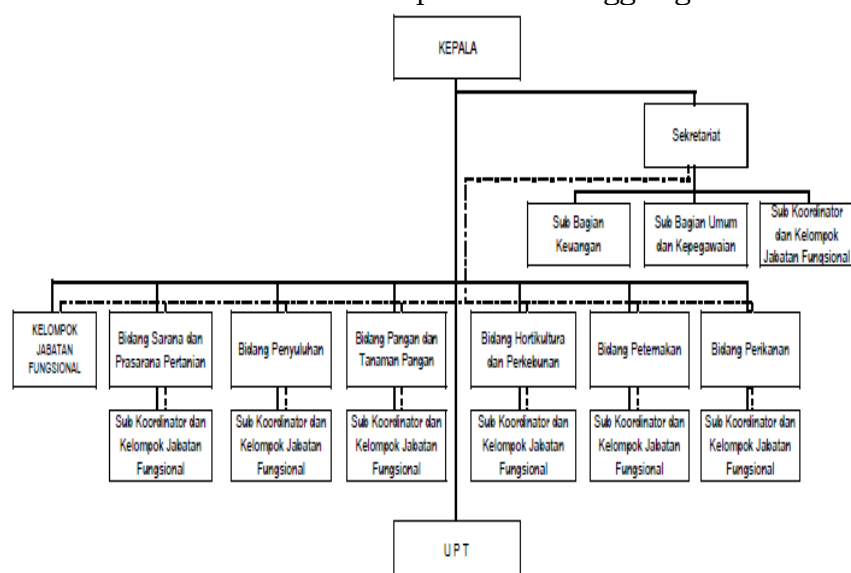
Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas kelompok Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Koordinator Perencanaan.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
 2. Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; dan
 3. Sub Koordinator Lahan dan Mitigasi Pertanian.
- d. Bidang Penyuluhan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Penyuluhan Pertanian; dan
 2. Sub Koordinator Kelembagaan Pertanian.
- e. Bidang Pangan dan Tanaman Pangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Pangan; dan

2. Sub Koordinator Tanaman Pangan.
- f. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Hortikultura; dan
 2. Sub Koordinator Perkebunan.
 - g. Bidang Peternakan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Kesehatan Hewan; dan
 2. Sub Koordinator Produksi Peternakan.
 - h. Bidang Perikanan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Produksi Perikanan; dan
 2. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - i. UPT; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan seksi sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :

2.1.2.1 Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan Pangan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

2.1.2.2 Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi

umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- g. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- l. Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi

perkantoran agar terwujud pelayanan prima;

- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

2.1.2.2.1 Sub Bagian Keuangan;

Mempunyai tugas melakukan Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan. Dengan rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan;
- h. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- j. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan Dinas;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- n. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2.2 Sub Koordinator Perencanaan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan dan kegiatan dilingkungan dinas;
- e. Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian kegiatan dilingkungan dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dinas;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja;
- i. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi dinas;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan

- peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah Dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - g. Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
 - h. Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. Merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset

- tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan Penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
 - l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - m. Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya;
 - n. Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
 - o. Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
 - p. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur kegiatan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian; menyiapkan bahan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Operasional Prosedur, Zona Integritas, Budaya Kerja serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;

- q. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan;
- r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- s. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- u. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3 Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian lahan dan mitigasi pertanian, meliputi sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan, prasarana pertanian, air irigasi dan

pengelolaan lahan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, adaptasi dan mitigasi pertanian, penyediaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian. Dengan rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Merumuskan program rencana teknis di bidang penyelenggaraan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan, prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, adaptasi dan mitigasi pertanian, penyediaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian;
- g. Merumuskan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan program sarana pertanian, prasarana pertanian, dan pengendalian lahan serta mitigasi pertanian;
- i. Mengoordinasikan pengkajian terhadap pengawasan, pengelolaan, pengendalian dan penggunaan sarana produksi pertanian yang meliputi pupuk, pestisida, benih, bibit, alat mesin pertanian dan sarana pertanian lainnya;

- j. Mengoordinasikan pengkajian terhadap pengawasan dan pengelolaan prasarana pertanian yang meliputi infrastruktur pertanian jalan usaha tani, irigasi, dam parit, embung pertanian dan lumbung pangan;
- k. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten berupa pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dampak banjir dan kekeringan lahan pertanian, penanganan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
- l. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengkajian terhadap pengendalian lahan dan mitigasi pertanian meliputi pengendalian dan pengelolaan kelestarian lahan dan alih fungsi lahan pertanian, pengawasan, pengelolaan, pengendalian dan penggunaan pestisida, serta pembiayaan dan asuransi pertanian;
- m. Melaksanakan bimbingan teknis Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk;
- n. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan pupuk berimbang, benih dan bibit tanaman pertanian;
- o. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan alat dan mesin pertanian serta sarana pertanian lainnya;
- p. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pemanfaatan infrastruktur pertanian meliputi jalan pertanian, jaringan irigasi pertanian dan lumbung pangan serta sarana prasarana pertanian lainnya;
- q. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- r. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian;
- s. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang berupa sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan, prasarana pertanian, air

- irigasi dan pengelolaan lahan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, adaptasi dan mitigasi pertanian, penyediaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian;
- t. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - u. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - v. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian membawahi 3 sub koordinator dengan tugas:

2.1.2.3.1 Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan teknis, bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, meliputi:

- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- b. Merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,

- masuk dan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- d. Melaksanakan pembinaan, penyediaan, pengembangan dan pengawasan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan penerapan teknologi sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
 - f. Melaksanakan penyediaan, pengendalian, pengembangan dan pemanfaatan sarana pertanian, pupuk dan pestisida;
 - g. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan fasilitasi pembiayaan pertanian;
 - h. Mengevaluasi dan menyusun pelaporan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.3.2 Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan teknis, bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Prasarana Pertanian, Air Irigasi dan Pengelolaan Lahan, meliputi:

- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- b. Merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,

- masuk dan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- d. Melaksanakan pembinaan, penyediaan, pengembangan dan pengawasan prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan penerapan teknologi prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
 - f. Pengembangan jalan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. Melaksanakan penyediaan, pengendalian, pengembangan dan pemanfaatan prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
 - h. Mengevaluasi dan menyusun pelaporan prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.3.3 Sub Koordinator Pengendalian Lahan dan Mitigasi Pertanian.

Mempunyai tugas merumuskan dan menyusun kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan teknis, bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian, meliputi:

- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- b. Merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi

Pertanian;

- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- d. Melaksanakan pembinaan, penyediaan, pengembangan dan pengawasan pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan penerapan teknologi pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- g. Pengendalian dan pemanfaatan pestisida pada hama penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- h. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten berupa pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dampak banjir dan kekeringan lahan pertanian, penanganan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
- i. Mengevaluasi dan menyusun pelaporan pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

2.1.2.4 Bidang Penyuluhan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perikanan,

peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyusun perumusan kebijakan di bidang penyuluhan;
- g. Menyusun program kerja di bidang Penyuluhan;
- h. Menyusun dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian dan perikanan;
- i. Menyusun dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia penyuluh dan petani;
- j. Menyelenggarakan pengembangan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan;
- l. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- m. Menyelenggarakan pembentukan badan usaha milik petani;
- n. Menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- o. Menyelenggarakan sekolah lapang, bimbingan teknis, pelatihan dan demplot kelompok tani tingkat kabupaten;

- p. Meningkatkan kapasitas Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian;
- q. Membina dan mengawasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan;
- r. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang penyuluhan;
- s. Memfasilitasi izin usaha pertanian dalam daerah Kabupaten;
- t. Menyusun standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian;
- u. Menilai kelayakan dan pemberian pertimbangan ijin teknis usaha pertanian;
- v. Membina dan mengawasi penerapan izin usaha pertanian;
- w. Melaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
- x. Melaksanakan kerjasama penyuluhan pertanian dan perikanan di tingkat kabupaten, regional dan nasional;
- y. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- z. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- aa. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- bb. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- cc. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Penyuluhan membawahi:

2.1.2.4.1 Sub Koordinator Penyuluhan Pertanian;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang penyuluhan pertanian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan penyuluhan;
- e. Menyiapkan bahan perumusan rencana pengembangan penyuluhan;
- f. Menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan program penyuluhan, pengidentifikasian kebutuhan penyelenggaraan kerjasama penyuluhan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan mekanisme kerja dan metode penyuluhan;
- h. Menyiapkan bahan penyediaan dan memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sekolah lapang, bimbingan teknis, pelatihan dan demplot kelompok tani tingkat kabupaten;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian dan perikanan;

- j. Menyiapkan bahan melaksanakan pengembangan diseminasi dan inovasi teknologi pertanian dan perikanan;
- k. Menyiapkan bahan fasilitasi ijin usaha pertanian dalam daerah kabupaten;
- l. Menyiapkan bahan pemberian ijin usaha pertanian, penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan ijin teknis usaha pertanian;
- m. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan ijin usaha pertanian pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh dan petani;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan bahan penataan jenjang karier, penghargaan dan sanksi bagi penyuluh, perumusan instrument penilaian kinerja penyuluh;
- o. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.4.2 Sub Koordinator Kelembagaan Pertanian.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan pertanian, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang kelembagaan pertanian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan pertanian;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan pertanian;

- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kelembagaan pertanian dan perikanan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan pola pengembangan, penguatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan;
- f. Menyiapkan bahan pemberian penghargaan bagi kelembagaan pertanian dan perikanan;
- g. Menyiapkan bahan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja kelembagaan pertanian dan perikanan;
- h. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama kelembagaan kelompok tani dengan pihak lain;
- i. Menyiapkan bahan memfasilitasi pembentukan badan usaha milik petani, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. Menyiapkan bahan identifikasi, pendataan, fasilitasi dan evaluasi kelengkapan struktur kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani, penyiapan instrumen dan pelaksanaan penilaian kelembagaan pertanian dan perikanan;
- k. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap kelembagaan pertanian dan perikanan pada semua level kewilayahan (kabupaten, kecamatan dan desa);
- l. Menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan rencana definitif kelompok dan rencana definitif kebutuhan kelompok;
- m. Menyiapkan bahan pembentukan forum, jaringan kelembagaan pertanian dan perikanan;
- n. Menyiapkan bahan fasilitasi administrasi kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan;
- o. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan pertanian; dan

- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.5 Bidang Pangan dan Tanaman Pangan

Mempunyai tugas Melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan tanaman pangan Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pangan dan Tanaman Pangan dengan rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Merumuskan program rencana teknis di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
- g. Menyiapkan bahan merumuskan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan program ketahanan pangan;

- i. Mengoordinasikan pengkajian terhadap ketersediaan dan distribusi pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- j. Membina, monitoring dan evaluasi dalam mendukung program ketahanan pangan;
- k. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal kuantitas dan kualitas pangan dan gizi;
- l. Menyebarluaskan informasi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan;
- m. Merumuskan program rencana teknis di bidang produksi dan produktivitas tanaman pangan;
- n. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi tanaman pangan;
- o. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan produksi dan produktivitas hasil tanaman pangan;
- p. Melaksanakan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan;
- q. Mengembangkan kawasan produksi tanaman pangan;
- r. Menyelenggarakan perumusan pertimbangan dan rekomendasi teknis tanaman pangan;
- s. Membinaan, mengawasi dan menilai kelayakan serta rekomendasi teknis izin usaha pertanian tanaman pangan;
- t. Mengumpulkan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan;
- u. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- v. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

- w. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- x. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Tanaman Pangan membawahi:

2.1.2.5.1 Sub Koordinator Pangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta rencana kebutuhan anggaran di bidang pangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pangan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pangan;
- e. Menyiapkan bahan identifikasi, pembinaan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan;
- f. Menyiapkan bahan identifikasi dan pembinaan dan pengembangan cadangan pangan masyarakat, pengelolaan cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten;
- g. Menyiapkan bahan identifikasi dan penanganan kelompok rawan pangan;
- h. Menyiapkan bahan identifikasi dan pengembangan infrastruktur distribusi

pangan;

- i. Menyiapkan bahan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan ketersediaan dan akses pangan;
- j. Menyiapkan bahan penyediaan dan penyebarluasan informasi harga pangan, dan penumbuhan jaringan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan identifikasi potensi sumberdaya dan keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan, peningkatan mutu/pola konsumsi pangan masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan analisa terhadap mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
- m. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar asal tumbuhan dan olahan skala kecil/rumah tangga;
- n. Menyiapkan bahan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
- o. Menyiapkan bahan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan;
- i. Menyiapkan bahan penerapan standar batas minimum residu, registrasi pangan segar asal tumbuhan dan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.5.2 Sub Koordinator Tanaman Pangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta rencana kebutuhan anggaran di sektor tanaman pangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di sektor tanaman pangan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis sektor tanaman pangan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan sektor tanaman pangan;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan teknis kegiatan tanaman pangan, peningkatan produksi produktivitas dan perlindungan tanaman pangan;
- f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan;
- g. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan;
- h. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu tanaman pangan, dan peningkatan penggunaan benih bermutu tanaman pangan;
- i. Menyiapkan bahan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil tanaman pangan, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis tanaman pangan;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani tanaman pangan, penyediaan data informasi harga pasar tanaman pangan, penyediaan

informasi susut hasil dan analisis usaha tani;

- k. Menyiapkan bahan pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas tanaman pangan;
- l. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas di bidang tanaman pangan;
- m. Menyiapkan bahan mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan;
- n. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.6 Bidang Hortikultura dan Perkebunan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Merumuskan program rencana teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
- g. Mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi hortikultura dan perkebunan;
- i. Melaksanakan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan;
- j. Melaksanakan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura dan perkebunan;
- k. Mengembangkan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura dan perkebunan;
- l. Menyelenggarakan perumusan pertimbangan dan rekomendasi teknis hortikultura dan perkebunan;
- m. Membinaan, mengawasi dan menilai kelayakan serta rekomendasi teknis ijin usaha pertanian hortikultura dan perkebunan;
- n. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data statistik hortikultura dan perkebunan;
- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Hortikultura dan Perkebunan membawahi:

2.1.2.6.1 Sub Koordinator Hortikultura.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang hortikultur;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hortikultur;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hortikultur;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang hortikultur;
- e. Menyiapkan bahan peningkatan produksi produktivitas dan perlindungan hortikultura;
- f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik hortikultura;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu hortikultura, dan peningkatan penggunaan benih bermutu hortikultura;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil hortikultura;
- i. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani hortikultura;
- j. Menyiapkan bahan penyediaan data informasi harga pasar hortikultura, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani;

- k. Menyiapkan bahan pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas hortikultura;
- l. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas hortikultura;
- m. Menyiapkan bahan mendukung pengamatan pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan serta bencana pertanian hortikultura;
- n. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.6.2 Sub Koordinator Perkebunan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perkebunan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang perkebunan;
- e. Menyiapkan bahan peningkatan produktivitas dan perlindungan perkebunan;
- f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis komoditas perkebunan;
- g. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perkebunan, fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu perkebunan;

- h. Menyiapkan bahan peningkatan penggunaan benih bermutu perkebunan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil perkebunan;
- j. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan produksi dan agribisnis perkebunan;
- k. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani perkebunan;
- l. Menyiapkan bahan penyediaan data informasi harga pasar perkebunan;
- m. Menyiapkan bahan penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani;
- n. Menyiapkan bahan pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas perkebunan;
- o. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas perkebunan;
- p. Menyiapkan bahan penilaian usaha perkebunan;
- q. Menyiapkan bahan mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit perkebunan;
- r. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.7 Bidang Peternakan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan, dengan rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Merumuskan program rencana teknis pengelolaan Sumber Daya Genetik hewan, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, serta pakan ternak, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak, penyediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, dan pengembangan lahan pengembalaan umum;
- g. Merumuskan program rencana teknis pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Kabupaten Temanggung, pengeluaran hewan dan produk hewan dari Kabupaten Temanggung; pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- h. Membina, pengawasan dan penilaian kelayakan serta rekomendasi teknis izin usaha peternakan dan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. Mengelola peraturan perundang-undangan peternakan dan kesehatan hewan;
- j. Mengembangkan kawasan produksi peternakan;

- k. Melaksanakan kebijakan pengendalian dan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan pakan ternak;
- l. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah;
- m. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi Produksi peternakan, agribisnis peternakan, pengelolaan sumber daya genetik hewan, usaha budidaya peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- n. Mengumpulkan, pengolahan dan penyajian peternakan dan kesehatan hewan;
- o. Mengembangkan kerjasama penelitian ilmiah di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- p. Menyusun data-data inventarisasi sarana dan prasana peternakan dan kesehatan hewan beserta bangunan pelengkapanya;
- q. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
- r. Melaksanakan kebijakan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- s. Melaksanakan penjaminan kesehatan hewan;
- t. Melaksanakan kebijakan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- u. Melaksanakan kebijakan pengawasan lalu lintas hewan/pemasukan dan pengeluaran hewan di daerah;
- v. Melaksanakan kebijakan pengawasan lalu lintas produk hewan dan produk olahan asal hewan di daerah;
- w. Menerapkan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- x. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- y. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan;
- z. Mengelola pelayanan kesehatan hewan;

- aa. Melaksanakan bimbingan teknis produk asal hewan dan hasil olahan asal hewan yang aman dan sehat, penerapan dan standar teknis Rumah Pemotongan Hewan, Tempat Pemotongan Hewan, Tempat Pelelangan Umum, pasar hewan, kios daging dan usaha susu;
- bb. Mengelola sarana dan prasarana pasar hewan;
- cc. Melaksana pembinaan dan pengawasan pada unit pelaksana teknis dinas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- dd. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan;
- ee. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- ff. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- gg. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- ii. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- iii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan membawahi:

2.1.2.7.1 Sub Koordinator Kesehatan Hewan;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang kesehatan hewan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di

- bidang kesehatan hewan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
 - e. Menyiapkan bahan penjaminan kesehatan hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan tidak menular, penanggulangan wabah penyakit menular;
 - f. Menyiapkan bahan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan;
 - g. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - h. Menyiapkan bahan pelayanan kesehatan hewan;
 - i. Menyiapkan bahan pengawasan penyimpanan dan penggunaan obat hewan dan vaksin;
 - j. Menyiapkan bahan pengawasan penerapan standar teknis serta pelayanan minimal puskesmas dan pelaku usaha di bidang kesehatan hewan;
 - k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data statistik di bidang kesehatan hewan;
 - l. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan hewan;
 - m. Menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner di rumah pemotongan hewan, tempat pemotongan hewan, tempat pelelangan umum, los daging, usaha susu di pasar tradisional dan pasar modern;
 - n. Menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
 - o. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan menular dan tidak menular;

- p. Menyiapkan bahan penyelenggaraan surat keterangan asal hewan dari kabupaten temanggung;
- q. Menyiapkan bahan penyelenggaraan surat pengantar pengiriman hewan yang keluar dari wilayah kabupaten temanggung;
- r. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis mutu produk asal hewan dan produk olahan asal hewan;
- s. Menyiapkan bahan pengawasan lalu lintas hewan yang masuk dan keluar dari kabupaten temanggung;
- t. Menyiapkan bahan bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- u. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- v. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pasar hewan;
- w. Menyiapkan bahan penyebaran informasi terkait pengembangan teknologi kesehatan masyarakat veteriner;
- x. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan; dan
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.7.2 Sub Koordinator Produksi Peternakan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi peternakan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang produksi peternakan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan;

- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi peternakan;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan, pengawasan mutu, kualitas dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan pakan ternak dalam daerah;
- f. Menyiapkan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pembibitan ternak;
- i. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan produksi peternakan;
- j. Menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak;
- k. Menyiapkan bahan inventarisasi potensi sumber daya peternakan;
- l. Menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penggunaan sarana produksi peternakan;
- m. Menyiapkan bahan pengawasan pengolahan dan penyajian data peternakan;
- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang peternakan, bimbingan teknis usaha budidaya peternakan;
- q. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan produk peternakan dan pemasaran hasil peternakan;
- r. Menyiapkan bahan bimbingan teknis permodalan usaha peternakan, bimbingan teknis peningkatan mutu dan diversifikasi produk peternakan, penyebaran teknologi terbaru;

- s. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi peternakan; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. 1.2.8 Bidang Perikanan

Melakukan pengoordinasian perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan meliputi pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun perencanaan berupa program dan kegiatan teknis di bidang pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Memfasilitasi dan mendampingi kelompok perikanan yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis pada kegiatan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan bimbingan terapan dari teknologi pakan ikan mandiri, produksi dan agribisnis perikanan, pelestarian sumber daya ikan dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kelayakan serta rekomendasi teknis ijin usaha perikanan;
- f. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang perikanan sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. Melaksanakan pengembangan kawasan budidaya perikanan;

- h. Mengoordinir pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perikanan;
- i. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan;
- j. Melaksanakan pengembangan kerjasama penelitian ilmiah di bidang perikanan;
- k. Mengoordinir penyusunan data-data inventarisasi sarana dan prasana perikanan beserta bangunan pelengkapanya;
- l. Melaksanakan pengendalian mutu benih dan pelaksanaan uji lapang teknologi pembenihan;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan teknis operasional pembenihan ikan kepada masyarakat;
- n. Melaksanakan penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan;
- o. Melaksanaan pengadaan dan penyaluran benih dan induk unggul kepada usaha pembenihan rakyat;
- p. Menyediakan kebutuhan benih ikan kepada masyarakat dan penebaran ikan di perairan umum;
- q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- s. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

- v. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Perikanan membawahi:

2.1.2.8.1 Seksi Produksi Perikanan;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perikanan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang produksi perikanan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi perikanan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi perikanan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perikanan;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- f. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan budidaya perikanan;
- g. Menyiapkan bahan pengembangan perbenihan ikan;
- h. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap mutu dan kualitas benih dan induk ikan yang masuk atau keluar dari daerah;
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan data inventarisasi potensi sumber daya perikanan;
- j. Menyiapkan bahan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan

- di perairan umum, pengelolaan data statistik perikanan;
- k. Menyiapkan bahan pengembangan pakan ikan mandiri, pengawasan peredaran sarana produksi perikanan;
 - l. Menyiapkan bahan pengendalian mutu benih dan pelaksanaan uji lapang teknologi pembenihan;
 - m. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan teknis operasional pembenihan ikan kepada masyarakat;
 - n. Menyiapkan bahan penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan;
 - o. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada usaha pembenihan rakyat;
 - p. Menyiapkan bahan penyediaan kebutuhan benih masyarakat dan penebaran di perairan umum;
 - q. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perikanan; dan
 - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.8.2 Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan di bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, permodalan usaha perikanan, pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan, peningkatan mutu dan diversifikasi produk perikanan;
- f. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi di bidang usaha perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

2.1.2.9 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

2.1.2.10 UPTD Balai Benih Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas di bidang pengelolaan balai benih pertanian serta pemberian bimbingan langsung terhadap usaha pembenihan rakyat dalam rangka peningkatan teknis pembenihan

Rincian Tugas:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT BBP di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan balai benih pertanian serta pemberian bimbingan langsung terhadap usaha pembenihan rakyat dalam rangka peningkatan teknis pembenihan;
- c. Penghasil benih tanaman untuk memenuhi keperluan benih masyarakat;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan pengendalian mutu benih yang dihasilkan usaha perbenihan masyarakat;
- e. Pelaksanaan uji lapangan teknologi pembenihan;
- f. Penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan kepada usaha pembenihan rakyat;
- g. Penyelenggaraan penatausahaan UPT BBP; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.10.1 Kepala Sub Bag Tata Usaha UPT BBP

Melaksanakan perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian pada UPT BBP.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat UPT BBP berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan UPT BBP; dan
- g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- h. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Tata Usaha UPT BBP;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat UPT BBP; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.11 UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT RPH dan Pasar Hewan yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pelayanan pemotongan hewan dan pengelolaan pasar hewan di wilayah kerjanya

Rincian Fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT RPH DAN PASAR HEWAN di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemotongan hewan sesuai dengan wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar hewan milik pemerintah daerah;
- d. Pelaksanaan penerapan standar teknis dan administrasi pelayanan meliputi sarana dan prasarana, tenaga kerja, dan prosedur yang telah diterapkan di UPT RPH DAN PASAR HEWAN;
- e. Pelaksanaan pengawasan pasar hewan desa di daerah;
- f. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan tempat pemotongan unggas di daerah;
- g. Pelaksanaan pembinaan kinerja pegawai di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan daging yang diperdagangkan di pasar;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan di wilayah kerjanya;
- j. Pelaksanaan, pemeliharaan sarana dan prasarana upt rph dan pasar hewan;
- k. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- l. Penyelenggaraan penatausahaan UPT RPH DAN PASAR HEWAN di wilayah kerjanya; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.11.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT RPH dan Pasar Hewan

Melaksanakan perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian pada UPT RPH dan Pasar Hewan.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat UPT RPH dan Pasar Hewan

- berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan UPT RPH dan Pasar Hewan;
 - g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - h. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
 - i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Tata Usaha UPT RPH dan Pasar Hewan;
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat UPT RPH dan Pasar Hewan; dan

- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.12 UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi

Buatan;

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan laboratorium dan pelayanan balai inseminasi buatan.

UPT Puskeswan dan BIB mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Puskeswan dan BIB di wilayah kerjanya;
- b. Pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan hewan dan BIB di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas operasional pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan di wilayah kerjanya;
- f. Menyelenggarakan penatausahaan UPT Puskeswan dan BIB di wilayah kerjanya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.12.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskeswan dan BIB

Melaksanakan perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian pada UPT Puskeswan dan BIB.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat UPT Puskeswan dan BIB berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan UPT Puskesmas dan BIB;
- g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- h. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas dan BIB;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat UPT Puskesmas dan BIB; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya DKPPP

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)**)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)								GOLONGAN/PANGKAT)							PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SM P	SLT A	D 1	D 2	D 3	S 1	S 2	S 3	I	I I	II I	I V	V	V II	I X	PI M I	PI M II	PI M III	PI M IV
KEPALA							1					1					1		
Eselon 3						1	3					4						1	
SEKRETA RIS							1					1						1	
Eselon 4					2	5	1				5	3							2
JFT		32																	
JFU	1	10			2	2				6	9								
PPPK	25				5	2 5							2 5	5	2 5				

2.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
 Aset dan Modal Penunjang Kinerja
 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)
1	TANAH	31	13.377.112.113,00
2	PERALATAN DAN MESIN	2.688	12.529.508.149,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	158	35.810.381.008,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	16	730.491.964,00
5	ASET TETAP LAINNYA	0	76.547.618,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1	98.015.645,00
TOTAL			64.443.933.621,00

2.3 Kinerja Pelayanan DKPPP

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029. Capaian kinerja Renstra periode sebelumnya tersaji dalam table dibawah ini:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Tahun 2020-2025

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2019	TARGET KINERJA							REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2024	CAPAIAN s.d 2024 (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024		
	INDIKATOR SASARAN																
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	72,8	73,4	78,1	78,2	78,3	78,5	78,7	79	78.8	79,7	80,1	93,5	89,43	100	100
2	Tingkat konsumsi ikan	kg/kap/th	20,91	21,17	21,23	21,29	21,34				23,34	24,34	24,34			100	100
3	Tingkat ketersediaan energi perkapita	kkal/kap/hr			2925	2930	2935				2.271	2.934	3.198	3113		100	100
4	Tingkat ketersediaan protein perkapita	gr/kapita/hr			103,4	103,6	103,8				124,99	62,59	83,19	76,75		73,94	73,94
5	Tingkat Ketersediaan lemak perkapita	gr/kapita/hr			37	37,25	37,5				na	78,97	64,66	63,63		100	100
6	Nilai Produksi Perikanan	Ribu Rp						349.364	349.500	349.638					248.894.213,88	100	100
7	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%						23,38	23,3	23,25					22,94	98,12	98,12
	INDIKATOR PROGRAM																
1	Rasio ketersediaan pangan	%		na	100	100	100	100	100	100	n.a	147,06	126,8	100	90,2	100	100

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2019	TARGET KINERJA							REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2024	CAPAIAN s.d 2024 (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024		
2	persentase desa pelaksana program ketahanan pangan	%	n.a	17,3	20,76	24,22	27,68				17,3	28,03	32,53	27,68		100	100
3	Persentase penanganan kerawanan pangan							100	100	100					100	100	100
4	Rasio lumbung pangan masyarakat	%			48	52	56					56	58	58		100	100
5	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%		na	90	90	90	90	90	90	n.a	100	100	90	98,37	100	100
6	Produktivitas ikan nila	kg/m2	3,19	4,1	4,7	5,4	6,2	1,2	1,3	1,4	3,82	4,05	5,4	6	1,21	100	100
7	Produktivitas ikan lele	kg/m2	8,73	10,5	11,5	12,6	13,8	12,6	12,7	12,8	10,521	10,76	12,6	14	12,6	100	100
8	Produktivitas ikan mas	kg/m2	5,23	5,6	5,7	5,8	6				5,529	5,62	5,8	6,2		100	100
9	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	na		10	20	30	10	10	10		12,48	43,58	30	59,08	100	100
10	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	%	na		33	33	33	10	10	10		222,22	100	33	21,4	100	100
11	Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	%	na		100	100	100					100	100	100		100	100
12	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	kg/kapita/tahun	na					22,08	22,52	22,97				na	22,27	100	100

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2019	TARGET KINERJA							REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2024	CAPAIAN s.d 2024 (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024		
13	Peningkatan produktifitas Padi	Kuintal/ha	62,15	62,95	63	63,15	63,3	61,25	61,5	61,75	59	59	63,15	63,3	61,49	100	100
14	Peningkatan produktifitas Jagung	Kuintal/ha	45,7	45,8	45,85	45,95	46	54,5	54,6	54,7	49	46,1	54	46	57,6	100	100
15	Peningkatan produktifitas Ubi kayu	Kuintal/ha	339	339,35	339,6	339,7	339,8				329,12	329,12	340,00 0	339,96		100	100
16	Produktivitas bawang putih	Kuintal/ha	79	79,25	79,35	79,45	79,6	60,5	61	61,25	65,84	65,1	69,16	71,41	73,02	87,05	86,89
17	Produktivitas bawang merah	Kuintal/ha	79,7	79,85	79,95	80	80,15	68	69	70	73,604	71,4	81	76,65	76,5	100	100
18	Produktivitas cabai rawit	Kuintal/ha	54,5	54,75	54,85	55	55	50	50,5	51	69,968	69,87	76,36	75,5	75	100	100
19	Produktivitas cabai besar	Kuintal/ha	69	69,25	69,35	69,4	69,5	65	65,5	66	72,101	70,57	79,04	77,53	76	100	100
20	Produktivitas tembakau	Kuintal/ha	6,53	6,65	6,7	6,75	6,8	6,2	6,2	6,2	6,782	6,88	6,68	6,8	6,7	99,03	98,3
21	Produktivitas kopi robusta	Kuintal/ha	6,9	7	7,1	7,2	7,25	7,1	7,15	7,2	6,79	7,15	6,93	7,25	7,44	96,26	95,6
22	Produktivitas Kopi Arabika	Kuintal/ha	6,7	6,75	6,8	6,9	7	6,5	6,5	6,5	6,2	6,11	5,9	7	5,51	85,51	84,29
23	Produktifitas Cengkeh	Kuintal/ha	2,04	2,1	2,25	2,35	2,45				3,025	2,32	4,17	2,83		100	100
24	Produktifitas Vanili	Kuintal/ha	2,83	2,88	2,9	2,93	2,95				2,092	2,93	3,02	2,96		100	100
25	Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	176,65	177	177,2	177,4	177,6	177,4	177,5	177,6	176,95	177,2	177,4	177,6	177,6	100	100
26	Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,66	13,68	13,69	13,7	13,71	13,7	13,71	13,72	13,68	13,69	13,7	13,71	13,71	100	100
27	Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,66	13,68	13,69	13,7	13,71	13,7	13,71	13,72	13,68	13,69	13,7	13,71	13,71	100	100

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2019	TARGET KINERJA							REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2024	CAPAIAN s.d 2024 (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024		
28	Produktivitas ternak ayam pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	100	100
29	Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/Ekor	10,3	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88	10,26	10,35	10,88	10,88	100	100
30	Produktivitas ternak ayam buras	Kg/Ekor	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7				0,7	0,7	0,7	0,7		100	100
31	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian32n pangan utama	%	na	na	76,45	76,5	76,55				na	76,64	79,15	79,15		100	100
32	Persentase kelahiran pedet	%	na	na	na	na	na	55,5	56	56,5	na	na	na	na	48,3	87	87
33	Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	%						100	100	100					100	100	100
34	Persentase penanganan penyakit hewan	%	na	na	85	85	90	85	87	89	na	96,68	100	90	97,43	100	100
35	Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	60	65	65	70	70	75	77	79	84,298	82,96	100	70	82,41	100	100
36	Persentase pengendalian bencana pertanian	%	n.a	NA	40,2	40,25	40,3	75	77	79	na	41,2	41,45	70	99,23	100	100

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2019	TARGET KINERJA							REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2024	CAPAIAN s.d 2024 (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024		
37	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	N.A	0,68	0,78	0,83	0,98	1,3	1,3	1,3	0,678	0,81	1,03	0,98	1,40	100	100
Ket : 1. Block hijau adalah indikator kinerja Renstra Tahun 2019-2023 yang sudah tidak menjadi indikator pada RPD 2024-2026																	

Pada tabel 2.3 digambarkan bahwa ada perubahan indikator kinerja utama dan indikator kinerja program pada periode Renstra 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status sangat tinggi ada 31 indikator, terdiri dari:
 - a. Skor Pola pangan Harapan
 - b. Tingkat konsumsi ikan
 - c. Tingkat Ketersediaan energi perkapita
 - d. Tingkat ketersediaan protein perkapita
 - e. Tingkat ketersediaan lemak perkapita
 - f. Nilai Produksi Perikanan
 - g. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
 - Rasio Ketersediaan Pangan
 - h. Persentase desa pelaksana program ketahanan pangan
 - i. Persentase penanganan kerawanan pangan
 - j. Rasio Lumbung Pangan ,asyarakat
 - k. Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman
 - l. Produktivitas Ikan Nila
 - m. Produktivitas Ikan Lele
 - n. Produktivitas Ikan Mas
 - o. Persentase nelayan perairan umum yang terbina
 - p. Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan
 - q. Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan
 - r. Angka Konsumsi Ikan (AKI)
 - s. Produktifitas Padi
 - t. Produktifitas Jagung
 - u. Peningkatan produktifitas Ubi kayu
 - v. Produktifitas Bawang Putih
 - w. Produktifitas Bawang Merah
 - x. Produktifitas Bawang Cabai Rawit
 - y. Produktifitas Bawang Cabai Besar
 - z. Produktivitas Tembakau
 - aa. Produktivitas Kopi Robusta
 - bb. Produktivitas cengkeh

- cc. Produktivitas vanili
- dd. Produktivitas ternak sapi
- ee. Produktivitas ternak domba
- ff. Produktivitas ternak kambing
- gg. Produktivitas ternak ayam pedaging
- hh. Produktivitas ternak ayam petelur
- ii. Produktivitas ternak ayam buras
- jj. Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama
- kk. Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya
- ll. Persentase penanganan penyakit hewan
- mm. Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat
- nn. Persentase pengendalian bencana pertanian
- oo. Persentase kelompok tani yang naik kelas

Faktor – faktor pendorong pencapaian target indikator tersebut antara lain :

1. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan dengan kegiatan intensifikasi pertanian dan penerapan system budidaya perikanan, penyediaan dan pemerataan sarana prasarana pertanian yang semakin baik;
2. Ketersediaan pangan telah tercukupi dengan baik, koordinasi intensif dengan pihak terkait untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang mencukupi;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perbaikan mutu gizi dan keseimbangan komposisi pangan, mengurangi ketergantungan pada salah satu jenis kelompok pangan;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mitigasi bencana pertanian akibat dampak perubahan iklim (serangan hama penyakit) dan KIE informasi iklim lebih awal;
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pelestarian sumber daya alam;
6. Pendataan statistik pengolahan hasil perikanan oleh petugas enumerator dan validator data statistik;
7. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten yang mendukung pencapaian swasembada pangan melalui berbagai program/kegiatan pertanian, perikanan dan

penerapan teknologi budidaya, teknologi pasca panen (GAP, GHP, GBP, GVP, CBIB, CPIB) yang semakin berkembang;

8. Trend harga beberapa komoditas pertanian yang tinggi sehingga meningkatkan antusias masyarakat untuk menanam khususnya komoditas hortikultura dan perkebunan ;
9. Peningkatan mekanisasi pertanian untuk efisiensi tenaga kerja;
10. Kemampuan petugas dalam menangani kasus penyakit sudah memenuhi tuntutan kasus di lapangan;
11. Pemahaman masyarakat akan pentingnya peran lumbung pangan sebagai langkah strategis dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan dan ketersediaan pangan sebagai bentuk antisipasi kerawanan pangan;
12. Meningkatnya partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga;

Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi diantaranya adalah:

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terbatas, berpengaruh pada pola konsumsi dan cara budidaya;
2. Perubahan iklim ekstrem meningkatkan serangan OPT
3. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dan perikanan belum merata;
4. GAP < GHP, CBIB, CPIB, GFP, GBP, GVP belum diterapkan secara maksimal sehingga budidaya belum efisien dan produktifitas kurang maksimal;
5. Tidak semua wilayah dapat memproduksi kebutuhan pangan yang beragam sesuai dengan pola pangan ideal;
6. Adanya fluktuasi harga dengan disparitas yang terlalu tinggi, harga saprodi/nak/kan yang terus naik, Ditambah dengan kebijakan impor yg kadang kurang berpihak kepada petani kecil.
7. Peremajaan tanaman cengkeh yang terserang BPKC belum optimal;
8. Pemotongan ternak sapi sebagian besar berbobot dibawah 200 kg dan Tingginya pemotongan usia domba dibawah 1 tahun
9. Rasio Penyuluh dan kelompok tidak ideal;
10. Penurunan kualitas lingkungan

2. Capaian indikator dengan status tinggi ada 2 terdiri dari:

- a. Produktivitas Kopi Arabika
- b. Presentase kelahiran Pedet

Faktor pendorong pencapaian target indikator tersebut diantaranya :

- 1. Upaya konservasi lahan lereng Sumbing, Sindoro, Prau dan Kopi Arabika untuk menambah pendapatan petani daerah tembakau;
- 2. Tersedianya obat dan peralatan yang memadai yang sebanding dengan animo masyarakat untuk IB tinggi

Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi diantaranya :

- 1. Kurangnya kerapatan/ densitas tanaman kopi arabika mengakibatkan produktivitas belum memenuhi target;
- 2. Perubahan iklim yang berpengaruh pada proses vegetatif dan generatif menjdi terganggu sehingga produktivitas kopi turun hingga 40-50%
- 3. Peningkatan serangan hama penyakit utamanya penggerek buah kopi
- 4. Penyembelihan sapi betina yang mengurangi akseptor IB
- 5. Dampak penyakit PMK dan LSD mengurangi populasi sapi betina dan mengakibatkan gangguan reproduksi pada sapi betina
- 6. Jumlah petugas dan populasi sapi yang belum seimbang

2.4 Capaian Indikaator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	78.8	79,7	80,1	78.8	79,7	IKU Renstra 2019-2023, dan RPD 2024-2026
2	Tingkat konsumsi ikan	kg/kap/th	23,34	24,34	24,34	23,34		IKU Renstra 2019-2023
3	Tingkat ketersediaan energi perkapita	kcal/kap/hr	2.271	2.934,00	3.198,00	2.271		IKU Renstra 2019-2023
4	Tingkat ketersediaan protein perkapita	gr/kapita/hr	124,99	62,59	83,19	124,99		IKU Renstra 2019-2023
5	Tingkat Ketersediaan lemak perkapita	gr/kapita/hr		78,97	64,66			IKU Renstra 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
6	Nilai Produksi Perikanan	Ribu Rp					248.894.214	IKU RPD 2024-2026
7	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%					22,94	IKU RPD 2024-2026
Ket : Yang di blok merupakan IKU pada RPD 2024-2026								

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa terdapat perubahan indicator kinerja pada periode Renstra 2019-2023 dan Renstra 2024-2026 . Dimana Renstra tahun 2019-2023 terdapat 5 indikator kinerja utama dengan 1 indikator pada tahun 2023 belum mencapai target (tingkat ketersediaan protein perkapita) dan 3 indikator kinerja utama pada Renstra 2024-2026 dengan realisasi 1 indikator belum mencapat target di tahun 2024 (kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB)

2.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5
Capaian indikator kinerja kunci sesuai tupoksi Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	194,23%	155,14%	100%	111,76%	5,79%	
2	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	14.031.366	100	100	100	0	
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	38,18	590	19,55	6,34	6,149	
4	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	118%	-70,72	276,09%	-56%	799%	
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	22,73%	85,60%	78,29%	67,77%	46,87%	

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja sangat fluktuatif, hal ini di karenakan terdapat komponen dalam perhitungan IKK berubah (menyesuaikan dengan pedoman dari Kepmendagri).

2.6 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun jenis pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Jenis pelayanan di Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jenis Izin	Sasaran
1. Surat Keterangan Terdaftar bagi Kelompok Tani;	Masyarakat Umum
2. Fasilitasi Penentuan Calon Lokasi Penanaman Bawang Putih bagi Importir Bawang Putih	Masyarakat Umum
3. Permohonan Data-Data terkait Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;	Masyarakat Umum
4. Penerbitan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK);	Masyarakat Umum
5. Penyewaan Gedung Graha Mina Bhakti Pasar Ikan Dangkel;	Masyarakat Umum
6. Penyewaan Guesthouse;	Masyarakat Umum
7. Penyewaan Mess / Penginapan;	Masyarakat Umum
8. Penyewaan Los Benih Ikan;	Masyarakat Umum
9. Penyewaan Los Ikan Konsumsi;	Masyarakat Umum
10. Penyewaan Kios;	Masyarakat Umum
11. Penjualan Ikan;	Masyarakat Umum
12. Bimbingan Teknis Perikanan;	Masyarakat Umum
13. Rekomendasi Teknis Kelompok Tani Ternak / Peternak;	Masyarakat Umum
14. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan BAH;	Masyarakat Umum
15. Bantuan Vaksin, obat per-oral dan desinfektan;	Masyarakat Umum
16. Tanggap cepat kejadian penyakit zoonosis (Rabies);	Masyarakat Umum
17. Tanggap cepat kejadian penyakit zoonosis (Avian Influenza);	Masyarakat Umum
18. Jasa Pematangan Hewan;	Masyarakat Umum

Jenis Izin		Sasaran
19.	Pelayanan Inseminasi Buatan;	Masyarakat Umum
20.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan;	Masyarakat Umum
21.	Rekomendasi Perijinan Usaha Perikanan;	Masyarakat Umum
22.	Rekomendasi Surat Izin Budidaya Ikan (SIUBI);	Masyarakat Umum
23.	Rekomendasi Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (SIUPHP);	Masyarakat Umum
24.	Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Mandiri;	Masyarakat Umum
25.	Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Praktek Bersama;	Masyarakat Umum
26.	Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Klinik Hewan;	Masyarakat Umum
27.	Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Rumah sakit Hewan;	Masyarakat Umum
28.	Rekomendasi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Praktek Dokter Hewan Mandiri;	Masyarakat Umum
29.	Rekomendasi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Praktek Dokter Warga Negara Asing;	Masyarakat Umum
30.	Rekomendasi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Tenaga Sarjana Kedokteran Hewan dan Paramedik Veteriner;	Masyarakat Umum
31.	Rekomendasi Izin Melakukan Pelayanan Inseminasi Buatan;	Masyarakat Umum
32.	Rekomendasi Izin Usaha Peredaran Obat Hewan di Depo Obat Hewan, Pet Shop, dan Poultry Shop;	Masyarakat Umum
33.	Rekomendasi Izin Usaha Peredaran Obat Hewan di Toko Obat Hewan;	Masyarakat Umum
34.	Rekomendasi Izin Usaha Pemotongan Hewan Ruminansia;	Masyarakat Umum
35.	Rekomendasi Izin Usaha Pemotongan Unggas;	Masyarakat Umum
36.	Rekomendasi Izin Jagal;	Masyarakat Umum
37.	Rekomendasi Izin Menjual Daging;	Masyarakat Umum
38.	Rekomendasi Izin Usaha Pemerahan Susu;	Masyarakat Umum
39.	Rekomendasi Izin Menjual Susu Segar;	Masyarakat Umum
40.	Rekomendasi Izin Usaha Produk Telur Unggas Konsumsi;	Masyarakat Umum
41.	Rekomendasi Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan bagi Tempat Penitipan Hewan Kesayangan;	Masyarakat Umum
42.	Rekomendasi Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan bagi Tempat Salon Hewan Kesayangan;	Masyarakat Umum
43.	Rekomendasi Izin Tempat Pembibitan Hewan Kesayangan;	Masyarakat Umum
44.	Rekomendasi Izin Usaha Pakan;	Masyarakat Umum
45.	Rekomendasi Izin Usaha Peternakan;	Masyarakat Umum
46.	Rekomendasi Tanda Daftar Peternakan;	Masyarakat Umum
47.	Rekomendasi Izin Perluasan Usaha Peternakan.	Masyarakat Umum

2.7 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.7.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan antara lain:

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi DKPPP Kabupaten Temanggung, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT.

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
1. Sumber Daya Alam yang melimpah: (tanah yang subur, air yang cukup, dan iklim yang mendukung pertanian. 2. Jumlah Penduduk (ada pasar yang besar untuk meningkatkan produksi pangan dan ketahanan pangan) 3. Ketersediaan teknologi pertanian (meningkatkan	1. Ketergantungan pada Impor (masih mengimpor pangan yang berarti ketergantungan pada daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan yang berpengaruh pada ketahanan pangan). 2. Infrastruktur Pertanian dan perikanan yang masih kurang dan belum merata, (jaringan irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan),	1. Pertumbuhan Ekonomi dan peningkatan permintaan pangan menjadi peluang untuk meningkatkan produksi, konsumsi pangan dan pendapatan 2. Perkembangan Teknologi Pertanian: dan perikanan yang lebih efisien dan produktif menjadi peluang untuk meningkatkan	1. Perubahan Iklim mempengaruhi produksi pangan, perikanan dan ketahanan pangan; 2. Pertumbuhan Penduduk yang Cepat, berarti ada ancaman terhadap ketersediaan pangan, termasuk peningkatan kebutuhan pangan dan peningkatan tekanan pada

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
efisiensi dan produksi pertanian)	sehingga produksi dan produktivitas belum optimal 3. Kemampuan Manajemen dan kapasitas SDM Petani dan nelayan kurang untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas pertanian	produktivitas dan kualitas pertanian dan perikanan 3. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang ketahanan pangan menjadi peluang untuk meningkatkan produksi, dkistribusi pangan yang baik dan konsumsi pangan yang seimbang.	sumber daya alam. 3. Peningkatan biaya produksi, termasuk peningkatan upah tenaga kerja pertanian, saprodi, pakan ternak, pakan ikan dan, berarti ada ancaman terhadap kemampuan petani dan nelayan untuk memproduksi pangan.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya dalam urusan pangan, pertanian dan perikanan masih menghadapi beberapa kendala. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DKPPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kesejahteraan Petani, Peternak Dan Pelaku Usaha Perikanan Masih Rendah	Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian dan Perikanan Masih Rendah	Masih Adanya Potensi Kerawanan Pangan
		Ketersediaan Pangan Pokok Fluktuatif
		Kurangnya penerapan standar mutu produk yang sesuai SOP, GAP (Good Agriculture Practice), GMP (Good Manufacturing Practice), GHP (Good Handling practice), GBP (Good Breeding Practice), GFP (Good Farming Practice) di lengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam budidaya pertanian
		Rendahnya penyediaan dan pemanfaatan prasarana pertanian
		Perubahan Iklim

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Adanya serangan hama penyakit yang belum tertangani
		Rasio jumlah PPL dan kelompok tani yang masih kurang
		Menurunnya daya dukung lingkungan
		Penerapan standar budidaya perikanan yang belum sesuai SOP, CBIB, CPIB di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan
		Ketersediaan ikan edemik di perairan umum kurang
		Fluktuasi harga saprodi pertanian dan perikanan
	Rendahnya mutu hasil pertanian dan perikanan	Mutu pangan segar asal tumbuhan yang belum memenuhi standart keamanan pangan
		Adanya penyakit hewan yang belum tertangani dan masih adanya produk dan bahan asal hewan yang belum memenuhi standart ASUH
		Budidaya pertanian dengan penerapan standar mutu produk yang sesuai SOP, HACCP (Hazard Analisis critical control point), GVP(Good veterinary practice) di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan

2.8 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kesejahteraan petani, peternak dan pelaku usaha perikanan masih rendah	Diversifikasi ekonomi daerah masih rendah	Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan, pola konsumsi dan keamanan pangan
			Perubahan iklim	Ketergantungan pada impor	Perubahan iklim	Peningkatan produksi pertanian , perikanan
			Keamanan pangan	Pola konsumsi yang belum beragam dan seimbang	Keamanan pangan	SDM petani (kualitas dan Kuantitas)
					Fluktuasi harga	Perubahan iklim

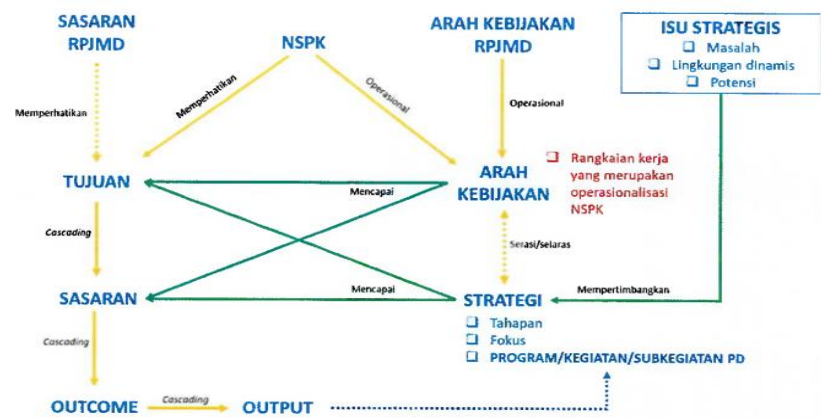
BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

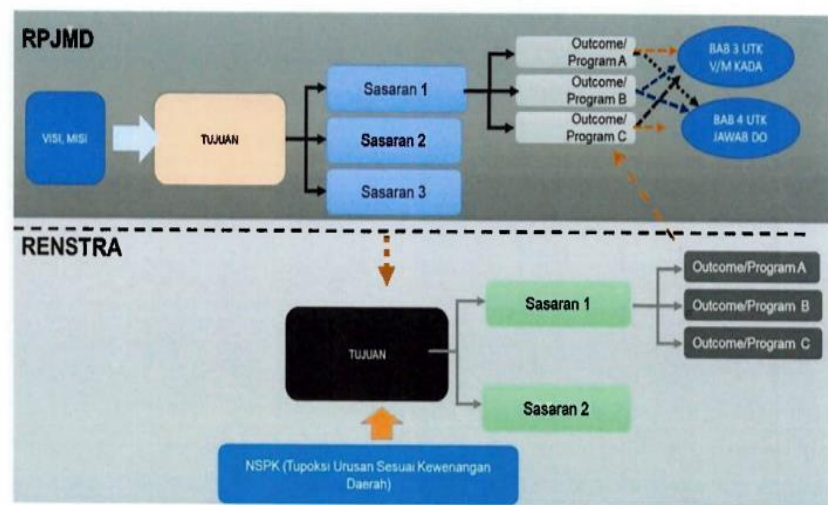
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan											
- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	78.91	79.27	7.63	79.9	80.35	80.72	81.08	
		Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	5.79	9.7	15.93	25.16	31.30	46.7	65.16	
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	11.72	9.70	9.29	8.88	8.47	8.20	8.06	
		Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) (Ton)	60	60	65	70	75	80	85	
			Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	22.25	22.25	22.30	22.41	22.52	22.64	22.75	
		Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	7.99	8	8	8	8	8	8	
			Rasio PDRB Sektor Pertanian (%)	22.47	22.40	22.35	22.30	22.25	22.20	22.15	
			Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	46.87	60	60	60	60	60	60	
			Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	6.149	6.15	6.16	6.17	6.18	6.19	6.20	
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	84.98	85.35	85.7	86	86.35	86.65	86.75	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	72.80	74.8	74.85	74.9	75	75.1	75.15	

Ket : Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Tujuan PD	Sasaran PD	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
		2025	2026	2027	2028	2029
Terpenuhinya Kebutuhan Pangan	Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan	Fasilitasi penyusunan rencana definitif kebutuhan konsumsi pangan	Fasilitasi penyusunan rencana definitif kebutuhan konsumsi pangan	Fasilitasi penyusunan rencana definitif kebutuhan konsumsi pangan	Fasilitasi penyusunan rencana definitif kebutuhan konsumsi pangan	Fasilitasi penyusunan rencana definitif kebutuhan konsumsi pangan
		Pengembangan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal dan budaya masyarakat	Pengembangan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal dan budaya masyarakat	Pengembangan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal dan budaya masyarakat	Pengembangan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal dan budaya masyarakat	Pengembangan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal dan budaya masyarakat
		Promosi dan edukasi tentang pola konsumsi pangan seimbang dan bergizi	Promosi dan edukasi tentang pola konsumsi pangan seimbang dan bergizi	Promosi dan edukasi tentang pola konsumsi pangan seimbang dan bergizi	Promosi dan edukasi tentang pola konsumsi pangan seimbang dan bergizi	Promosi dan edukasi tentang pola konsumsi pangan seimbang dan bergizi
		Peningkatan produksi melalui penerapan standar mutu produk dan produksi yang sesuai SOP, GAP, GMP, GHP, HACCP, GBP, GFP, GVP di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan	Peningkatan produksi melalui penerapan standar mutu produk dan produksi yang sesuai SOP, GAP, GMP, GHP, HACCP, GBP, GFP, GVP di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan	Peningkatan produksi melalui penerapan standar mutu produk dan produksi yang sesuai SOP, GAP, GMP, GHP, HACCP, GBP, GFP, GVP di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan	Peningkatan produksi melalui penerapan standar mutu produk dan produksi yang sesuai SOP, GAP, GMP, GHP, HACCP, GBP, GFP, GVP di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan	Peningkatan produksi melalui penerapan standar mutu produk dan produksi yang sesuai SOP, GAP, GMP, GHP, HACCP, GBP, GFP, GVP di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan

Tujuan PD	Sasaran PD	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
		2025	2026	2027	2028	2029
		Peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi pangan	Peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi pangan	Peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi pangan	Peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi pangan	Peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi pangan
		Penguatan kelembagaan petani	Penguatan kelembagaan petani	Penguatan kelembagaan petani	Penguatan kelembagaan petani	Penguatan kelembagaan petani
		Pengadaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah	Pengadaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah	Pengadaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah	Pengadaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah	Pengadaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah
			Pengembangan desa/kawasan mandiri pangan;	Pengembangan desa/kawasan mandiri pangan;	Pengembangan desa/kawasan mandiri pangan;	Pengembangan desa/kawasan mandiri pangan;
	Meningkatnya produksi perikanan	Penerapan standar mutu produk dan produksi yang sesuai CBIB dan CPIB di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan	Penerapan standar mutu produk dan produksi yang sesuai CBIB dan CPIB di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan	Penerapan standar mutu produk dan produksi yang sesuai CBIB dan CPIB di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan	Penerapan standar mutu produk dan produksi yang sesuai CBIB dan CPIB di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan	Penerapan standar mutu produk dan produksi yang sesuai CBIB dan CPIB di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan
		Peningkatan partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya perairan	Peningkatan partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya perairan	Peningkatan partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya perairan	Peningkatan partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya perairan	Peningkatan partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya perairan
		Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan skala kecil	Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan skala kecil	Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan skala kecil	Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan skala kecil	Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan skala kecil
		Peningkatan ketersediaan induk ikan, benih ikan dan pakan ikan dengan	Peningkatan ketersediaan benih ikan dan pakan ikan dengan	Peningkatan ketersediaan induk ikan, benih ikan dan pakan ikan dengan	Peningkatan ketersediaan benih ikan dan pakan ikan dengan	Peningkatan ketersediaan benih ikan dan pakan ikan dengan

Tujuan PD	Sasaran PD	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
		2025	2026	2027	2028	2029
		jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau	jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau	jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau	jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau	jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau
		Peningkatan efisiensi usaha perikanan budidaya dan memenuhi skala ekonomi	Peningkatan efisiensi usaha perikanan budidaya dan memenuhi skala ekonomi	Peningkatan efisiensi usaha perikanan budidaya dan memenuhi skala ekonomi	Peningkatan efisiensi usaha perikanan budidaya dan memenuhi skala ekonomi	Peningkatan efisiensi usaha perikanan budidaya dan memenuhi skala ekonomi
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya	Peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya	Peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya	Peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya	Peningkatan pemberdayaan masyarakat pembudidaya
		Himbauan/larangan penangkapan ikan dengan strum dan bahan peledak	Himbauan/larangan penangkapan ikan dengan strum dan bahan peledak	Himbauan/larangan penangkapan ikan dengan strum dan bahan peledak	Himbauan/larangan penangkapan ikan dengan strum dan bahan peledak	Himbauan/larangan penangkapan ikan dengan strum dan bahan peledak
		Komunikasi, informasi dan edukasi mengenai penangkapan ikan tidak ramah lingkungan	Komunikasi, informasi dan edukasi mengenai penangkapan ikan tidak ramah lingkungan	Komunikasi, informasi dan edukasi mengenai penangkapan ikan tidak ramah lingkungan	Komunikasi, informasi dan edukasi mengenai penangkapan ikan tidak ramah lingkungan	Komunikasi, informasi dan edukasi mengenai penangkapan ikan tidak ramah lingkungan
		Meningkatkan prsesntase penabaran ikan di perairan umum (danau, sungai, dan sejenisnya)	Meningkatkan prsesntase penabaran ikan di perairan umum (danau, sungai, dan sejenisnya)	Meningkatkan prsesntase penabaran ikan di perairan umum (danau, sungai, dan sejenisnya)	Meningkatkan prsesntase penabaran ikan di perairan umum (danau, sungai, dan sejenisnya)	Meningkatkan prsesntase penabaran ikan di perairan umum (danau, sungai, dan sejenisnya)
	Meningkatnya Produksi Pertanian	Fasilitasi penyusunan rencana definitif kebutuhan sarana produksi pertanian	Fasilitasi penyusunan rencana definitif kebutuhan sarana produksi pertanian	Fasilitasi penyusunan rencana definitif kebutuhan sarana produksi pertanian	Fasilitasi penyusunan rencana definitif kebutuhan sarana produksi pertanian	Fasilitasi penyusunan rencana definitif kebutuhan sarana produksi pertanian
		Penerapan standar mutu produk dan produksi yang sesuai SOP, GAP, GMP, GHP, HACCP, GBP, GFP, GVP di lengkap dengan	Penerapan standar mutu produk dan produksi yang sesuai SOP, GAP, GMP, GHP, HACCP, GBP, GFP, GVP di lengkapai dengan	Penerapan standar mutu produk dan produksi yang sesuai SOP, GAP, GMP, GHP, HACCP, GBP, GFP, GVP di lengkapai dengan	Penerapan standar mutu produk dan produksi yang sesuai SOP, GAP, GMP, GHP, HACCP, GBP, GFP, GVP di lengkapai dengan	Penerapan standar mutu produk dan produksi yang sesuai SOP, GAP, GMP, GHP, HACCP, GBP, GFP, GVP di lengkapai dengan

Tujuan PD	Sasaran PD	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
		2025	2026	2027	2028	2029
		sarana dan prasarana yg dibutuhkan	sarana dan prasarana yg dibutuhkan	sarana dan prasarana yg dibutuhkan	sarana dan prasarana yg dibutuhkan	sarana dan prasarana yg dibutuhkan
		Rehabilitasi dan pembanguhnan prasarana pertanian	Rehabilitasi dan pembanguhnan prasarana pertanian	Rehabilitasi dan pembanguhnan prasarana pertanian	Rehabilitasi dan pembanguhnan prasarana pertanian	Rehabilitasi dan pembanguhnan prasarana pertanian
		Menyusun regulasi terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian lahan pertanian	Koordinasi dan informasi pengendalian alih fungsi lahan	Koordinasi dan informasi pengendalian alih fungsi lahan	Koordinasi dan informasi pengendalian alih fungsi lahan	Koordinasi dan informasi pengendalian alih fungsi lahan
		Komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pemanfaatan teknologi pertanian	Komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pemanfaatan teknologi pertanian	Komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pemanfaatan teknologi pertanian	Komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pemanfaatan teknologi pertanian	Komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pemanfaatan teknologi pertanian
		KIE mitigasi dan adaptasi bencana pertanian secara terpadu	KIE mitigasi dan adaptasi bencana pertanian secara terpadu	KIE mitigasi dan adaptasi bencana pertanian secara terpadu	KIE mitigasi dan adaptasi bencana pertanian secara terpadu	KIE mitigasi dan adaptasi bencana pertanian secara terpadu
		Penguatan SDM dan kelembagaan petani	Penguatan SDM dan kelembagaan petani	Penguatan SDM dan kelembagaan petani	Penguatan SDM dan kelembagaan petani	Penguatan SDM dan kelembagaan petani

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan)

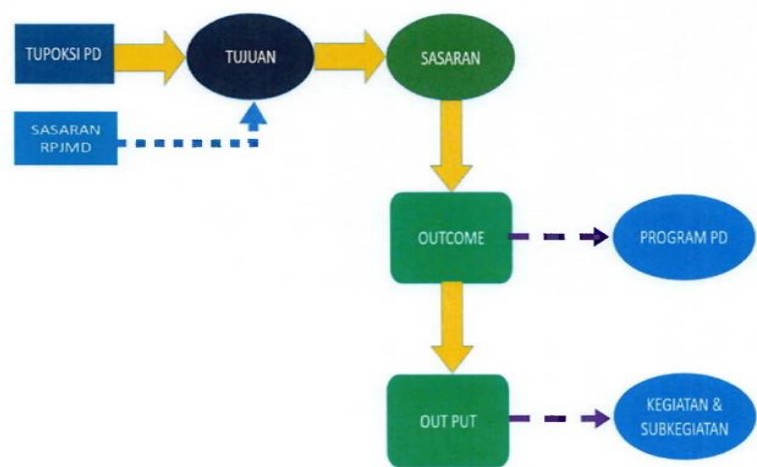
No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Arah Kebijakan DKPPP
1	Urusan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor perekonomian dengan: peningkatan sektor industri dalam pembangunan ekonomi, peningkatan nilai usaha perdagangan, peningkatan kinerja koperasi dan UMKM, peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan peningkatan produksi pertanian	Peningkatan produksi sektor pertanian dan perikanan	Fasilitasi penyusunan rencana definitif kebutuhan sarana produksi pertanian
				Penerapan standar mutu produk dan produksi yang sesuai SOP, GAP, GMP, GHP, HACCP, GBP, GFP, GVP, CBiB, CPIB di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan
				Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana pertanian
				Menyusun regulasi terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian lahan pertanian
				Komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pemanfaatan teknologi pertanian
				KIE mengenai pengendalian bencana pertanian secara terpadu
				meningkatkan intensitas pengendalian bencana pertanian
				Penguatan SDM dan kelembagaan petani
		Pemerataan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian dengan: peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja, tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi, peningkatan produksi perikanan,	Peningkatan dan pengelolaan ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	a. Penyediaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah
				b. Peta ketahanan dan kerentanan pangan,
				c. Pengembangan desa/kawasan mandiri pangan;

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Arah Kebijakan DKPPP
		peningkatan pemajuan kebudayaan, peningkatan investasi, peningkatan jumlah layanan di mal pelayanan publik		Penerapan standar mutu produk dan produksi yang sesuai SOP, GAP, GMP, GHP, HACCP, GBP, GFP, GVP di lengkapi dengan sarana dan prasarana yg dibutuhkan
			Penyediaan pangan yang cukup	mengembangkan sistem logistik pangan yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan aksesibilitas pangan melalui koordinasi lintas sektor
				peningkatan produksi pangan
			Peningkatan pengawasan dan pengendalian	a. Peningkatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar
			Peningkatan kesadaran dan edukasi	b. Komunikasi, informasi dan edukasi mengenai keamanan pangan
			Peningkatan kerjasama dan koordinasi	• KIE mengenai higiene-sanitasi produk hewan, manajemen peternakan dan kesehatan hewan • Peningkatan frekwensi surveilens

Dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dalam kemajuan Pembangunan di Kabupaten Temanggung, khususnya hasil Forum PD, maka aspirasi dalam penyusunan Renstra 2025-2029 kami akomodir dalam program-program serta kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Ketahnan Pangan Pertanian dan Perikanan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1
 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Perencanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan dititik beratkan pada upaya mewujudkan tujuan pembangunan khususnya Program-program strategis nasional, program delegasi provinsi serta program yang mendukung visi serta misi pemerintah daerah.

Prioritas program dan kegiatan pada upaya untuk mempertahankan produksi guna tercukupinya kebutuhan pangan yang mencakup komoditas tanaman pangan (padi, jagung dan tanaman pangan lainnya) serta pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, tembakau, bawang putih, bawang merah, cabai (rawit, keriting) serta komoditas peternakan dengan dukungan ketersediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian yang memadai, serta komoditas perikanan. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan							
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan				Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		
		Tercukupinya kebutuhan pangan dan keberagaman pola konsumsi pangan			Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)		
					Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
				Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan		Skor Pola Pangan Harapan	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			pangan masyarakat	Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan masyarakat		Presentase penanganan kerawanan pangan	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Terlaksananya penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Terlaksananya Penanganan kerawanan pangan dengan penyediaan cadangan pangan pemerintah dan peningkatan aksesibilitas pangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan		Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			keamanan pangan	Terlaksanannya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya produksi perikanan			Angka Konsumsi Ikan		
					Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)		
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Terlaksanannya pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
					Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0008 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	3.25.04.2.04.0013 - Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	
			Meningkatnya pengawasan pengelolaan		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			sumber daya kelautan dan perikanan	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat		Jumlah produksi pengolahan ikan	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Terlaksananya penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
		Meningkatnya Produksi Pertanian			Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		
					Rasio PDRB Sektor Pertanian		
					Persentase kinerja realisasi pupuk		
					Produktivitas pertanian per hektar per tahun		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya produksi, dan kualitas hasil pertanian		Produktivitas Padi	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas jagung	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas bawang putih	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas bawang merah	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas cabai rawit	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas cabai keriting	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas tembakau	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas kopi robusta	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Produktivitas kopi arabika	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					jumlah produksi ternak unggas	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					jumlah produksi telur	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah produksi daging ternak besar	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					jumlah produksi daging ternak kecil	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Persentase kelahiran pedet	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
				terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
			Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		Persentase Prasarana yang digunakan	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
					Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		Persentase penanganan penyakit hewan	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
					Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Terlaksananya penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			dan kelembagaan petani		persentase kenaikan kelas kelompok tani	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Terlaksananya penyuluhan pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publi			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
					Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		
					Nilai AKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah laporanÂ administrasi keuanganÂ perangkat daerah yang tersedia	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.09.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				daerah yang disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.09.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.09.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.09.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.09.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.09.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2 Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATO R OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					24.688.266.392 ,00		24.890.538.167 ,00		24.983.838.578 ,00		25.733.223.086 ,00		25.641.820.964 ,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					24.218.266.392 ,00		24.420.209.167 ,00		24.812.815.896 ,00		25.560.865.179 ,00		25.469.412.406 ,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	84.36	85.35	857	24.218.266.392 ,00	86	24.420.209.167 ,00	86.35	24.812.815.896 ,00	86.65	25.560.865.179 ,00	86.75	25.469.412.406 ,00	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Pangan
	Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)	7436	74.8	74.85		74.9		75		75.1		75.15		Dinas/Bada n yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					50.000.000,00		50.035.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Ketersediaa n Pangan Pokok (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.035.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI					350.000.000,00		350.245.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATO R OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	89.43	89.73	90.03	350.000.000,00	90.33	350.245.000,00	90.63	50.000.000,00	90.93	50.000.000,00	91.23	50.000.000,00	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					50.000.000,00		50.035.000,00		50.730.487,00		51.684.220,00		51.720.399,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan masyarakat	Presentase penangana n kerawanan pangan (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.035.000,00	100	50.730.487,00	100	51.684.220,00	100	51.720.399,00	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					20.000.000,00		20.014.000,00		20.292.195,00		20.673.687,00		20.688.159,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar (%)	100	100	100	20.000.000,00	100	20.014.000,00	100	20.292.195,00	100	20.673.687,00	100	20.688.159,00	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Pangan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					610.000.000,00		610.392.000,00		618.181.449,00		628.863.259,00		629.268.465,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	140.12	140.15	140.20	50.000.000,00	140.50	50.000.000,00	140.75	50.000.000,00	141.00	50.000.000,00	141.10	50.000.000,00	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATO R OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					250.000.000,00		250.175.000,00		253.652.432,00		258.421.098,00		258.601.993,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	10670.4 1	10670. 94	10672. 01	250.000.000,00	10673. 61	250.175.000,00	10675. 74	253.652.432,00	10678. 41	258.421.098,00	10681. 62	258.601.993,00	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					50.000.000,00		50.035.000,00		50.730.487,00		51.684.219,00		51.720.399,00	
Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan (%)	-	10	10	50.000.000,00	10	50.035.000,00	10	50.730.487,00	10	51.684.219,00	10	51.720.399,00	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					260.000.000,00		260.182.000,00		263.798.530,00		268.757.942,00		268.946.073,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah produksi pengolahan ikan (Ton)	395.75	395.75 2	395.75 2	260.000.000,00	395.76 0	260.182.000,00	395.76 0	263.798.530,00	395.76 0	268.757.942,00	395770	268.946.073,00	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					29.987.501.407 ,00		30.008.457.658 ,00		30.424.880.218 ,00		30.995.927.967 ,00		31.017.590.117 ,00	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN					20.147.681.407 ,00		20.161.784.784 ,00		20.442.033.592 ,00		20.826.343.824 ,00		20.840.922.265 ,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATO R OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
Meningkatnya produksi, dan kualitas hasil pertanian	Produktivitas Padi (Ton/Ha)	6.149	6.15	6.16	20.147.681.407,00	6.17	20.161.784.784,00	6.18	20.442.033.592,00	6.19	20.826.343.824,00	6.2	20.840.922.265,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas jagung (Ton/Ha)	5.76	5.5	5.55		5.6		5.7		5.75		5.8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas bawang putih (Ton/Ha)	7.3	6.05	6.15		6.16		6.17		6.18		6.19		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas bawang merah (Ton/Ha)	7.65	6.8	7.10		7.11		7.12		7.13		7.13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas cabai rawit (Ton/Ha)	7.5	7.00	7.01		7.02		7.03		7.04		7.05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas cabai keriting (Ton/Ha)	-	7.00	7.01		7.02		7.03		7.04		7.05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas tembakau (Ton/Ha)	0.67	0.64	0.643		0.645		0.645		0.648		0.65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas kopi robusta (Ton/Ha)	0.744	0.7020	0.7025		0.7025		0.705		0.7075		0.708		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas kopi arabika (Ton/Ha)	0.55	0.400	0.410		0.4150		0.42		0.4250		0.427		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	jumlah produksi ternak unggas (Kg)	0	6230875	6243337		6255823		6268335		6280872		6293433		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATO R OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
	jumlah produksi telur (Kg)	-	6860985	6867846		6874713		6874713		6881588		6888470		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama (%)	35.06	36.10	37.13		38.17		39.21		40.22		41.28		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Jumlah produksi daging ternak besar (Kg)	-	806130	807654		809172		810693		812214		813735		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	jumlah produksi daging ternak kecil (Kg)	-	267584	268110		268637		269163		269690		270216		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase kelahiran pedet (%)	48.3	48	48		48		48		48		48		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					5.625.000.000,00		5.628.937.500,00		5.707.179.731,00		5.814.474.710,00		5.818.544.842,00	
Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan (%)	100	100	100	5.625.000.000,00	100	5.628.937.500,00	100	5.707.179.731,00	100	5.814.474.710,00	100	5.818.544.842,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					647.300.000,00		647.753.110,00		656.756.878,00		669.103.908,00		669.572.280,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan	Persentase penangana	97.43	85	86	647.300.000,00	87	647.753.110,00	88	656.756.878,00	89	669.103.908,00	89	669.572.280,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATO R OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
dan kesehatan masyarakat veteriner	n penyakit hewan (%)													Bidang Pertanian
	Persentase pengawasaan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat (%)	82.41	75	76		77		78		79		79		Dinas/Bada n yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian (%)	82	75	78	50.000.000,00	81	50.000.000,00	84	50.000.000,00	87	50.000.000,00	90	50.000.000,00	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					3.517.520.000,00		3.519.982.264,00		3.568.910.017,00		3.636.005.525,00		3.638.550.730,00	
Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi (%)	-	58	58	3.517.520.000,00	58	3.519.982.264,00	58	3.568.910.017,00	58	3.636.005.525,00	58	3.638.550.730,00	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Pertanian
	persentase kenaikan kelas kelompok tani (%)	1.4	1.3	1.3		1.3		1.3		1.3		1.3		Dinas/Bada n yang menangani Bidang Pertanian
TOTAL KESELURUHAN					55.285.767.799,00		55.509.387.825,00		56.026.900.245,00		57.358.014.312,00		57.288.679.546,00	

Berdasarkan tabel 4.2. diketahui bahwa dalam mencapai tujuan dan sasaran dinas guna mendukung tercapainya visi misi Pembangunan 5 tahun mendatang didukung anggaran untuk 14 Program (termasuk program penunjang urusan) dan 26 kegiatan yang saling berkesinambungan dan berkelanjutan.

Tabel 4.3
Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				24.688.266.392,00		24.890.538.167,00		24.983.838.578,00		25.733.223.086,00		25.641.820.964,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24.218.266.392,00		24.420.209.167,00		24.812.815.896,00		25.560.865.179,00		25.469.412.406,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	84.36	85.7	24.218.266.392,00	86	24.420.209.167,00	86.35	24.812.815.896,00	86.65	25.560.865.179,00	86.75	25.469.412.406,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	74.36	74.85		74.9		75		75.1		75.15		
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00	
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00	7	1.000.000,00	
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				22.601.504.828,00		22.677.447.603,00		23.070.054.332,00		23.778.103.615,00		23.761.650.842,00	
Jumlah laporanÅ administrasi keuanganÅ perangkat daerah yang tersedia	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	218	219	22.601.504.828,00	219	22.677.447.603,00	219	23.070.054.332,00	219	23.778.103.615,00	219	23.761.650.842,00	
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				22.601.504.828,00		22.677.447.603,00		23.070.054.332,00		23.778.103.615,00		23.761.650.842,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	218	219	22.601.504.828,00	219	22.677.447.603,00	219	23.070.054.332,00	219	23.778.103.615,00	219	23.761.650.842,00	
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				157.500.000,00		157.500.000,00		157.500.000,00		157.500.000,00		157.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	157.500.000,00	12	157.500.000,00	12	157.500.000,00	12	157.500.000,00	12	157.500.000,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	24		24		24		24		24		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23	23		23		23		23		23		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-		-		-		-		-		
2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23	23	15.000.000,00	23	15.000.000,00	23	15.000.000,00	23	15.000.000,00	23	15.000.000,00	
2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		-		-		-		-	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	24	40.000.000,00	24	40.000.000,00	24	40.000.000,00	24	40.000.000,00	24	40.000.000,00	
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47.500.000,00		47.500.000,00		47.500.000,00		47.500.000,00		47.500.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	47.500.000,00	12	47.500.000,00	12	47.500.000,00	12	47.500.000,00	12	47.500.000,00	
2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	3	20.000.000,00	3	65.000.000,00	3	65.000.000,00	3	65.000.000,00	3	65.000.000,00	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-		3		3		3		3		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3		3		3		3		3		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			3		3		3		3		
2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-	7	35.000.000,00	7	35.000.000,00	7	35.000.000,00	7	35.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	7	35.000.000,00	7	35.000.000,00	7	35.000.000,00	7	35.000.000,00	
2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	
2.09.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.09.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.189.261.564,00		1.204.261.564,00		1.204.261.564,00		1.244.261.564,00		1.189.261.564,00	
Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	1.189.261.564,00	12	1.204.261.564,00	12	1.204.261.564,00	12	1.244.261.564,00	12	1.189.261.564,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		
2.09.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	130.000.000,00	12	130.000.000,00	12	130.000.000,00	12	130.000.000,00	12	130.000.000,00	
2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.057.761.564,00		1.072.761.564,00		1.072.761.564,00		1.112.761.564,00		1.057.761.564,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	12	1.057.761.564,00	12	1.072.761.564,00	12	1.072.761.564,00	12	1.112.761.564,00	12	1.057.761.564,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan												
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				249.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		295.000.000,00	
Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	10	249.000.000,00	10	315.000.000,00	10	315.000.000,00	10	315.000.000,00	10	295.000.000,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10		10		10		10		10		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	8		8		8		8		8		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2			10		10		10		10		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			10		10		10		10		
2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49	49	130.000.000,00	49	130.000.000,00	49	130.000.000,00	49	130.000.000,00	49	130.000.000,00	
2.09.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				-		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	-	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	10	19.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	
2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	8	100.000.000,00	8	125.000.000,00	8	125.000.000,00	8	125.000.000,00	8	125.000.000,00	
2.09.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		-	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	-	
2.09.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-		-		-		-		-	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				50.000.000,00		50.035.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok	100	100	50.000.000,00	100	50.035.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.035.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-	1	50.000.000,00	1	50.035.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				50.000.000,00		50.035.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-	1	50.000.000,00	1	50.035.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				350.000.000,00		350.245.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	89.43	90.03	350.000.000,00	90.33	350.245.000,00	90.63	50.000.000,00	90.93	50.000.000,00	91.23	50.000.000,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				350.000.000,00		350.245.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	-	6	350.000.000,00	6	350.245.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal				350.000.000,00		350.245.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	-	6	350.000.000,00	6	350.245.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				50.000.000,00		50.035.000,00		50.730.487,00		51.684.220,00		51.720.399,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan masyarakat	Presentase penanganan kerawanan pangan	100	100	50.000.000,00	100	50.035.000,00	100	50.730.487,00	100	51.684.220,00	100	51.720.399,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.035.000,00		30.730.487,00		31.684.220,00		31.720.399,00	
Terlaksananya Penanganan kerawanan pangan dengan penyediaan cadangan pangan pemerintah dan peningkatan aksesibilitas pangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.36	5	30.000.000,00	5	30.035.000,00	5	30.730.487,00	5	31.684.220,00	5	31.720.399,00	
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.035.000,00		30.730.487,00		31.684.220,00		31.720.399,00	
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.36	5	30.000.000,00	5	30.035.000,00	5	30.730.487,00	5	31.684.220,00	5	31.720.399,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu keamanan Pangan Segar	100	100	20.000.000,00	100	20.014.000,00	100	20.292.195,00	100	20.673.687,00	100	20.688.159,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.014.000,00		20.292.195,00		20.673.687,00		20.688.159,00	
Terlaksanannya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	1	20.000.000,00	1	20.014.000,00	1	20.292.195,00	1	20.673.687,00	1	20.688.159,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.014.000,00		20.292.195,00		20.673.687,00		20.688.159,00	
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	1	20.000.000,00	1	20.014.000,00	1	20.292.195,00	1	20.673.687,00	1	20.688.159,00	
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				610.000.000,00		610.392.000,00		618.181.449,00		628.863.259,00		629.268.465,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	140.12	140.20	50.000.000,00	140.50	50.000.000,00	140.75	50.000.000,00	141.00	50.000.000,00	141.10	50.000.000,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	-	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	-	2		2		2		2		2		
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	-	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	-	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				250.000.000,00		250.175.000,00		253.652.432,00		258.421.098,00		258.601.993,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	10670.41	10672.01	250.000.000,00	10673.61	250.175.000,00	10675.74	253.652.432,00	10678.41	258.421.098,00	10681.62	258.601.993,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				110.000.000,00		110.175.000,00		113.652.432,00		103.421.098,00		103.601.993,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3	3	110.000.000,00	3	110.175.000,00	3	113.652.432,00	3	103.421.098,00	3	103.601.993,00	
	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	4		4		5		5		5		
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Dava Ikan Kecil				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	90.000.000,00	3	90.000.000,00	
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				10.000.000,00		10.175.000,00		13.652.432,00		13.421.098,00		13.601.993,00	
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	4	10.000.000,00	4	10.175.000,00	5	13.652.432,00	5	13.421.098,00	5	13.601.993,00	
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00	
	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	-	1		1		1		1		1		
	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1		1		1		1		1		
	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	3		3		3		3		3		
	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-							1		1		
3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		-		-		10.000.000,00		10.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-		-		-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	
3.25.04.2.04.0008 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
3.25.04.2.04.0013 - Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				50.000.000,00		50.035.000,00		50.730.487,00		51.684.219,00		51.720.399,00	
Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan	-	10	50.000.000,00	10	50.035.000,00	10	50.730.487,00	10	51.684.219,00	10	51.720.399,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.035.000,00		50.730.487,00		51.684.219,00		51.720.399,00	
Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-	10	50.000.000,00	10	50.035.000,00	10	50.730.487,00	10	51.684.219,00	10	51.720.399,00	
3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				50.000.000,00		50.035.000,00		50.730.487,00		51.684.219,00		51.720.399,00	
Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-	10	50.000.000,00	10	50.035.000,00	10	50.730.487,00	10	51.684.219,00	10	51.720.399,00	
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				260.000.000,00		260.182.000,00		263.798.530,00		268.757.942,00		268.946.073,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Jumlah produksi pengolahan ikan	395.75	395.752	260.000.000,00	395.760	260.182.000,00	395.760	263.798.530,00	395.760	268.757.942,00	395770	268.946.073,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				260.000.000,00		260.182.000,00		263.798.530,00		268.757.942,00		268.946.073,00	
Terlaksananya penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		260.000.000,00		260.182.000,00		263.798.530,00		268.757.942,00		268.946.073,00	
3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				260.000.000,00		260.182.000,00		263.798.530,00		268.757.942,00		268.946.073,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
berdasarkan skala usaha dan risiko													
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		260.000.000,00		260.182.000,00		263.798.530,00		268.757.942,00		268.946.073,00	
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				29.987.501.407,00		30.008.457.658,00		30.424.880.218,00		30.995.927.967,00		31.017.590.117,00	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				20.147.681.407,00		20.161.784.784,00		20.442.033.592,00		20.826.343.824,00		20.840.922.265,00	
Meningkatnya produksi, dan kualitas hasil pertanian	Jumlah produksi daging ternak besar	-	807654	20.147.681.407,00	809172	20.161.784.784,00	810693	20.442.033.592,00	812214	20.826.343.824,00	813735	20.840.922.265,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Produktivitas tembakau	0.67	0.643		0.645		0.645		0.648		0.65		
	Produktivitas Padi	6.149	6.16		6.17		6.18		6.19		6.2		
	Produktivitas kopi robusta	0.744	0.7025		0.7025		0.705		0.7075		0.708		
	Produktivitas kopi arabika	0.55	0.410		0.4150		0.42		0.4250		0.427		
	Produktivitas jagung	5.76	5.55		5.6		5.7		5.75		5.8		
	Produktivitas cabai rawit	7.5	7.01		7.02		7.03		7.04		7.05		
	Produktivitas cabai keriting	-	7.01		7.02		7.03		7.04		7.05		
	Produktivitas bawang putih	7.3	6.15		6.16		6.17		6.18		6.19		
	Produktivitas bawang merah	7.65	7.10		7.11		7.12		7.13		7.13		
	Persentase kelahiran pedet	48.3	48		48		48		48		48		
	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	35.06	37.13		38.17		39.21		40.22		41.28		
	jumlah produksi ternak unggas	0	6243337		6255823		6268335		6280872		6293433		
	jumlah produksi telur	-	6867846		6874713		6874713		6881588		6888470		
	jumlah produksi daging ternak kecil	-	268110		268637		269163		269690		270216		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				13.373.681.407,00		12.759.615.180,00		13.039.863.988,00		13.477.645.543,00		13.485.975.155,00	
Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	1	13.373.681.407,00	1	12.759.615.180,00	1	13.039.863.988,00	1	13.477.645.543,00	1	13.485.975.155,00	
	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	1		1		1		1		1		
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				11.993.681.407,00		11.519.739.584,00		11.679.863.964,00		11.899.445.407,00		11.907.775.019,00	
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	1	11.993.681.407,00	1	11.519.739.584,00	1	11.679.863.964,00	1	11.899.445.407,00	1	11.907.775.019,00	
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1.380.000.000,00		1.239.875.596,00		1.360.000.024,00		1.578.200.136,00		1.578.200.136,00	
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	1	1.380.000.000,00	1	1.239.875.596,00	1	1.360.000.024,00	1	1.578.200.136,00	1	1.578.200.136,00	
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				6.774.000.000,00		7.402.169.604,00		7.402.169.604,00		7.348.698.281,00		7.354.947.110,00	
terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1	1	6.774.000.000,00	1	7.402.169.604,00	1	7.402.169.604,00	1	7.348.698.281,00	1	7.354.947.110,00	
	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	1		1		1		1		1		
3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				6.749.000.000,00		7.377.169.604,00		7.377.169.604,00		7.323.698.281,00		7.329.947.110,00	
Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	1	6.749.000.000,00	1	7.377.169.604,00	1	7.377.169.604,00	1	7.323.698.281,00	1	7.329.947.110,00	
3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				5.625.000.000,00		5.628.937.500,00		5.707.179.731,00		5.814.474.710,00		5.818.544.842,00	
Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Prasarana yang digunakan	100	100	5.625.000.000,00	100	5.628.937.500,00	100	5.707.179.731,00	100	5.814.474.710,00	100	5.818.544.842,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola			30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	1		1		1		1		1		
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-	
Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan			-		-		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola												
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				5.595.000.000,00		5.598.937.500,00		5.677.179.731,00		5.784.474.710,00		5.788.544.842,00	
Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	4	5.595.000.000,00	4	5.598.937.500,00	4	5.677.179.731,00	4	5.784.474.710,00	4	5.788.544.842,00	
	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1	1		1		1				1		
	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi												
	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi												
	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	4		4		4		4		4		
	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara												
	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	-		-		-		-		1		
	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4	4		4		4		4		4		
3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian				800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				1.025.879.000,00		1.025.879.000,00		1.025.879.000,00		1.025.879.000,00		1.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4	4	1.025.879.000,00	4	1.025.879.000,00	4	1.025.879.000,00	4	1.025.879.000,00	4	1.000.000.000,00	
3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				-		-		-		-		-	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			-		-		-		-		-	
3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				-		-		-		-		1.000.000.000,00	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.000.000.000,00	
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				2.025.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	4	2.025.000.000,00	4	2.000.000.000,00	4	2.000.000.000,00	4	2.000.000.000,00	4	2.000.000.000,00	
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				1.709.121.000,00		1.738.058.500,00		1.816.300.731,00		1.923.595.710,00		953.544.842,00	
terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi			1.709.121.000,00		1.738.058.500,00		1.816.300.731,00		1.923.595.710,00		953.544.842,00	
3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas				-		-		-		-		-	
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi			-		-		-		-		-	
3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		35.000.000,00	1	35.000.000,00	
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				647.300.000,00		647.753.110,00		656.756.878,00		669.103.908,00		669.572.280,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	97.43	86	647.300.000,00	87	647.753.110,00	88	656.756.878,00	89	669.103.908,00	89	669.572.280,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	82.41	76		77		78		79		79		
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				258.500.000,00		258.680.950,00		262.276.615,00		267.207.416,00		267.394.460,00	
Terlaksananya penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	20	20	258.500.000,00	20	258.680.950,00	20	262.276.615,00	20	267.207.416,00	20	267.394.460,00	
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				258.500.000,00		258.680.950,00		262.276.615,00		267.207.416,00		267.394.460,00	
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	20	20	258.500.000,00	20	258.680.950,00	20	262.276.615,00	20	267.207.416,00	20	267.394.460,00	
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				388.800.000,00		389.072.160,00		394.480.263,00		401.896.492,00		402.177.820,00	
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1	1	388.800.000,00	1	389.072.160,00	1	394.480.263,00	1	401.896.492,00	1	402.177.820,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				388.800.000,00		389.072.160,00		394.480.263,00		401.896.492,00		402.177.820,00	
Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1	1	388.800.000,00	1	389.072.160,00	1	394.480.263,00	1	401.896.492,00	1	402.177.820,00	
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	82	78	50.000.000,00	81	50.000.000,00	84	50.000.000,00	87	50.000.000,00	90	50.000.000,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	230	50		50		35		35		35		
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				50.000.000,00		50.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	230	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	35	35.000.000,00	35	35.000.000,00	35	35.000.000,00	
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				-		-		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	-	-	-	-	-	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Perkebunan yang Ditangani												
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				3.517.520.000,00		3.519.982.264,00		3.568.910.017,00		3.636.005.525,00		3.638.550.730,00	
Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani	persentase kenaikan kelas kelompok tani	1.4	1.3	3.517.520.000,00	1.3	3.519.982.264,00	1.3	3.568.910.017,00	1.3	3.636.005.525,00	1.3	3.638.550.730,00	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Persentase kelompok tani yang sudah menggunakan teknologi	-	58		58		58		58		58		
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				3.517.520.000,00		3.519.982.264,00		3.568.910.017,00		3.636.005.525,00		3.638.550.730,00	
Terlaksananya penyuluhan pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			3.517.520.000,00		3.519.982.264,00		3.568.910.017,00		3.636.005.525,00		3.638.550.730,00	
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	20		20		20		20		20		
	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5	20		20		20		20		20		
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	20		20		20		20		20		
	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	142		142		142		142		142		
	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	-	3		3		3		4		4		
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	20	800.000.000,00	20	800.000.000,00	20	800.000.000,00	20	800.000.000,00	20	800.000.000,00	
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				500.000.000,00		502.413.264,00		550.367.336,00		600.000.000,00		600.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	20	500.000.000,00	20	502.413.264,00	20	550.367.336,00	20	600.000.000,00	20	600.000.000,00	
3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				-		-		-		-		-	
Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			-		-		-		-		-	
3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5	20	1.500.000.000,00	20	1.500.000.000,00	20	1.500.000.000,00	20	1.500.000.000,00	20	1.500.000.000,00	
3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				647.520.000,00		647.520.000,00		647.520.000,00		647.520.000,00		647.520.000,00	
Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	142	647.520.000,00	142	647.520.000,00	142	647.520.000,00	142	647.520.000,00	142	647.520.000,00	
3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				70.000.000,00		70.049.000,00		71.022.681,00		88.485.525,00		91.030.730,00	
Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penvuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	-	3	70.000.000,00	3	70.049.000,00	3	71.022.681,00	4	88.485.525,00	4	91.030.730,00	

Dari tabel 4.3. dapat disampaikan bahwa guna mendukung pencapaian visi misi Bupati serta tujuan dan sasaran perangkat daerah maka, dukungan anggaran dari berbagai sumber pendanaan sangat dibutuhkan. Perencanaan kegiatan dan sub kegiatan urusan pangan, pertanian dan perikanan saling berkaitan,

terintegrasi dan berkelanjutan guna mempertahankan produksi sehingga tercapainya ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
1.	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2.	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi, dan kualitas hasil pertanian	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
			3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
4.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian
			3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
			3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian
			3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
			3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
			3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
			3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
			3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
5.	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
			3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
			3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
6.	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
			3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
			3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
7.	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
			3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
			3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
			3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
			3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
			3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

Dari tabel 4.4. disimpulkan bahwa ada 7 program yang direncanakan dalam Renstra DKPPP tahun 2025-2029 yang mendukung program prioritas Bupati dalam mewujudkan visi dan misi Pembangunan daerah.

Tabel 4.5 Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah

No	Program Delegasi	Outcome	Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan nila	Meningkatnya produksi ikan	Program pengelolaan perikanan budidaya
			Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil
			Pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil

No	Program Delegasi	Outcome	Program/Kegiatan/Subkegiatan
			Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha Pengelolaan pembudidayaan ikan Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
2	Pendampingan sertifikasi halal, haki (hak atas kekayaan intelektual) dan p-irt (pangan industri rumah tangga) secara gratis	Meningkatnya produksi dan kualitas hasil pertanian, peningkatan efisiensi produksi pertanian	Program pengawasan keamanan pangan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota
3	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas juleha	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
4	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok wanita	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi

No	Program Delegasi	Outcome	Program/Kegiatan/Subkegiatan
			Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
			Program penyuluhan pertanian
			Pelaksanaan penyuluhan pertanian
			Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa
			Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa
			Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota
			Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian

Dari tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa ada 5 Program yang di rencanakan dalam Renstra DKPPP Tahun 2025-2029 mendukung program-program prioritas Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.6 Program Nasional

NO.	Program Delegasi	Outcome	Program/Kegiatan/Subkegiatan
1.	Ketahanan Pangan	Meningkatnya Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi
			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

NO.	Program Delegasi	Outcome	Program/Kegiatan/Subkegiatan
			Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota:
			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
			Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan
			Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota :
			•Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya

NO.	Program Delegasi	Outcome	Program/Kegiatan/Subkegiatan
			Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Penyediaan Data Dan Informasi Sumber Daya Ikan
			Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
			Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
			Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
		Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
			Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan
			Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
			Penyediaan Data Dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan
			Monitoring Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

NO.	Program Delegasi	Outcome	Program/Kegiatan/Subkegiatan
		Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
			Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan Dan/Atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota
		Meningkatnya pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil
			Penyediaan Data Dan Informasi Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Skala Usaha Dan Risiko
			Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Urusan Pemerintahan Urusan Pertanian
	Meningkatnya Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

NO.	Program Delegasi	Outcome	Program/Kegiatan/Subkegiatan
			Penjaminan Kemurnian Dan Kelestarian Sdg Hewan/Tanaman
			Pemanfaatan Sdg Hewan/Tanaman
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Meningkatnya Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Pengembangan Prasarana Pertanian
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lp2b, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Kp2b Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lcp2b Di Kabupaten/Kota
			Pembangunan Prasarana Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Embung Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Dam Parit
			Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya
			SPembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
			SPembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Dan Operasionalisasi Puskeswan

NO.	Program Delegasi	Outcome	Program/Kegiatan/Subkegiatan
		Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Dan Zoonosis Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
		Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Opt) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (Dpi) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan
		Meningkatnya Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa
			Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
			Pembentukan Dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

NO.	Program Delegasi	Outcome	Program/Kegiatan/Subkegiatan
			Penyediaan Dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian

Dari tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa ada 13 Program yang di rencanakan dalam Renstra DKPPP Tahun 2025-2029 mendukung program-program prioritas nasional untuk ketahanan pangan.

Dalam mendukung program strategis nasional maka direncanakan program-program dan kegiatan yang tercantum dalam tabel 4.7

Tabel 4.7
Daftar Program Perangkat Daerah Dalam Mendukung Program Strategis Nasional

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PD	SUB KEGIATAN	ANGGARAN					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	Penanggulangan kemiskinan								
	1) Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem								Mendasarkan pada Kepmendagri Nomor 400.2.4/9839/bangda Tahun 2025 perihal tagging Sub Kegiatan Kemiskinan Ekstrem
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang	30.000.000	30.035.000	30.730.487	31.684.220	31.720.399	Pengadaan dan Penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk masyarakat

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PD	SUB KEGIATAN	ANGGARAN					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
			Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	100.000.000	100.000.000	100.000.000	90.000.000	90.000.000	Bantuan sarpras budidaya ikan untuk peningkatan produksi komoditas perikanan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	258.500.000	258.680.950	262.276.615	267.207.416	267.394.460	Pengobatan gratis untuk ternak
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	350.000.000	350.245.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Bantuan sarpras pertanian untuk kebun B2SA (pekarangan pangan lestari)
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	Bantuan embung pertanian untuk mempertahankan produksi
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.025.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Bantuan Green house untuk mempertahankan produksi
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	11.993.681.407	11.519.739.584	11.679.863.964	11.899.445.407	11.907.775.019	Bantuan pupuk, obat-obatan pertanian, bibit/benih, pelatihan dan sarpras pertanian lainnya

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PD	SUB KEGIATAN	ANGGARAN					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.380.000.000	1.239.875.596	1.360.000.024	1.578.200.136	1.578.200.136	Bantuan alsintan untuk efisiensi tenaga kerja
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	6.774.000.000	7.402.169.604	7.402.169.604	7.348.698.281	7.354.947.110	bantuan ternak
2	Kesehatan Untuk Semua								
	2) Makan Bergizi Gratis								
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						
			Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.014.000	20.292.195	20.673.687	20.688.159	Uji PSAT Di SPPG
3	Ketahanan Pangan								
	1) Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri								Ranahnya Bulog, DKPPP berperan dalam sosialisasi peraturanya

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PD	SUB KEGIATAN	ANGGARAN					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
	2) Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	30.035.000	30.730.487	31.684.220	30.000.000	Pengadaan dan Penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk masyarakat
4	Pertumbuhan Ekonomi								
	1) Pengendalian Inflasi								Penyelenggaraan GPM untuk stabilisasi harga

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.09.3.27.3.25.03.0000 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan									
	INDIKATOR TUJUAN									
1	IKP		78,91	79,27	79,63	79,9	80,35	80,72	81,08	
	INDIKATOR SASARAN									
1.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	11,72	9,7	9,29	8,88	8,47	8,2	8,06	
2.	Rasio PDRB Sektor Pertanian	%	22,47	22,4	22,35	22,3	22,25	22,2	22,15	
3.	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	22,25	22,25	22,3	22,41	22,52	22,64	22,75	

Berdasarkan tabel 4.8. diketahui bahwa di DKPPP ada 4 indikator kinerja utama yaitu 1 indikator tujuan dan 3 indikator sasaran sesuai dengan 3 urusan yang menjadi kewenangan yaitu urusan pangan, pertanian dan perikanan. Target indikator 5 tahun kedepan didasarkan pada data trend pencapaian tahun sebelumnya dan prediksi yang dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan Renstra dan RPJMD 2025-2029.

Tabel 4.9
Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)		%	5.79	9.7	15.93	25.16	31.30	46.7	65.16	
	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)		%	60	60	65	70	75	80	85	
	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
1.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		%	7.99	8	8	8	8	8	8	
2..	Persentase kinerja realisasi pupuk	positif	%	46.87	60	60	60	60	60	60	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	positif	%	6.149	6.15	6.16	6.17	6.18	6.19	6.20	

Berdasarkan tabel 4.8. diketahui bahwa terdapat urusan wajib yaitu urusan pangan dengan 1 indikator kinerja kunci dan urusan pilihan dengan 1 indikator urusan perikanan serta 3 indikator kunci urusan pertanian. Target indicator 5 tahun kedepan didasarkan pada data trend pencapaian tahun sebelumnya dan prediksi yang dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan Renstra dan RPJMD 2025-2029.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Renstra ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Selain itu, Renstra merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pangan, pertanian dan perikanan. Pada perjalanannya Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dapat di reviu, jika target kinerja sudah terlampaui atau terdapat perubahan target.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab Temanggung ini.

Temanggung, 19 September 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Temanggung



JOKO BUDI NURYANTO, SP, MSI
NIP. 197105301998031005